



PU SDA
PROVINSI JAWA TIMUR

RENSTRA

Rencana Strategis

TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN KE - II

DINAS PU
SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR



Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra PD disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Salah satu alasan perubahan Renstra Perubahan ke-2 Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Pemilihan dikarenakan untuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada tiap Pemerintah Daerah mengacu pada Kemendagri 050 -5889 Tahun 2021 Tentang HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

Proses Penyusunan Renstra PD Tahun 2019 – 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
- e. Perangkat Daerah;
- f. perumusan rancangan akhir; dan
- g. penetapan

Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD, Renstra KL dan Renja PD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Renstra PD yang berdimensi 5 tahun merupakan rencana kegiatan PD dalam rangka

mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Secara detil, Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam RPJMD dengan Target Tahunan terukur yang dipresentasikan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).

- b. Renstra Kementerian/Lembaga dalam lingkup sektoral yang sama, secara umum memiliki Strategi dan Arah Kebijakan yang selaras dengan Renstra PD. Sehingga dalam lingkup teknis operasional, Dokumen Renstra PD harus berkolerasi kuat dengan Renstra K/L. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian Sasaran dan Tujuan PD dan K/L dapat memberi manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat.
- c. Pencapaian target Renstra PD yang berdimensi 5 tahun, untuk selanjutnya di distribusikan ke dalam target – target tahunan yang diuraikan secara terperinci dalam Rencana Kerja PD. Secara *cascading*, RPJMD dijabarkan melalui Renstra PD dan di *breakdown* dalam Renja PD.
- d. Perubahan Renstra yaitu termasuk kegiatan dari pusat atas Pemuktahiran peraturan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verivikasi, Validasi dan, Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2019 – 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046)
- 3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - 7) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 - 8) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
 - 9) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 10) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 12) Undang-Undang No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
 - 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 - 14) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentag Cipta Kerja.
 - 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
 - 22) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
 - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 26) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 32) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429)
 - 33) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638)
 - 34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 - 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
 - 36) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
 - 37) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3

- Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 68);
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 –
- 40) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
- 41) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 61, Seri E)
- 42) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 49 Seri E)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Menyediakan dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup Gambaran Kerja, Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan PD sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah

2. Sebagai pedoman kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja
3. Sebagai pedoman Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Renja PD disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan Pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Daerah, Proses Penyusunan Renstra PD dan Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja PD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Peraturan Perundangan yang mengatur SOTK dan Pedoman yang dijadikan Acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra bagi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 PD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan SOTK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memuat diantaranya Dasar Hukum pembentukan, Struktur Organisasi dan uraian tugas dan fungsi sampai dengan level Bidang.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan kondisi eksisting sumber daya yang dimiliki Dinas meliputi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Unit Usaha

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah

ditetapkan ditetapkan

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Mengemukakan macam – macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab 3 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan PD beserta faktor yang mempengaruhi

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan Visi dan Misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selain itu Sub Bab ini menjelaskan faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Sektoral Lainnya

Mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran Jangka Menengah Renstra K/L.

- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS

- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Metode penentuan isu strategis dan hasil penentuan isu strategis, dan apa saja yang akan ditangani melalui Renstra PD pada tahun rencana.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam 5 tahun mendatang. Dalam Bab ini disajikan matriks yang menunjukkan konsistensi dan relevansi antara pernyataan Visi dan Misi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD

Bab 6 Rencana Program

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Perumusan program dan kegiatan menggunakan referensi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tupoksi dan Uraian Tugas, dan Arah peraturan perundang – undangan.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup

Merupakan bagian pengesahan dan penegasan mengenai pentingnya penyusunan Renstra PD untuk peningkatan kinerja PD dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD yang telah ditetapkan dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, pada Penutup juga ditegaskan mengenai penggunaan Dokumen Renstra sebagai pedoman Penyusunan Renja PD dan RKA serta sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD selain untuk keperluan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra.

Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN

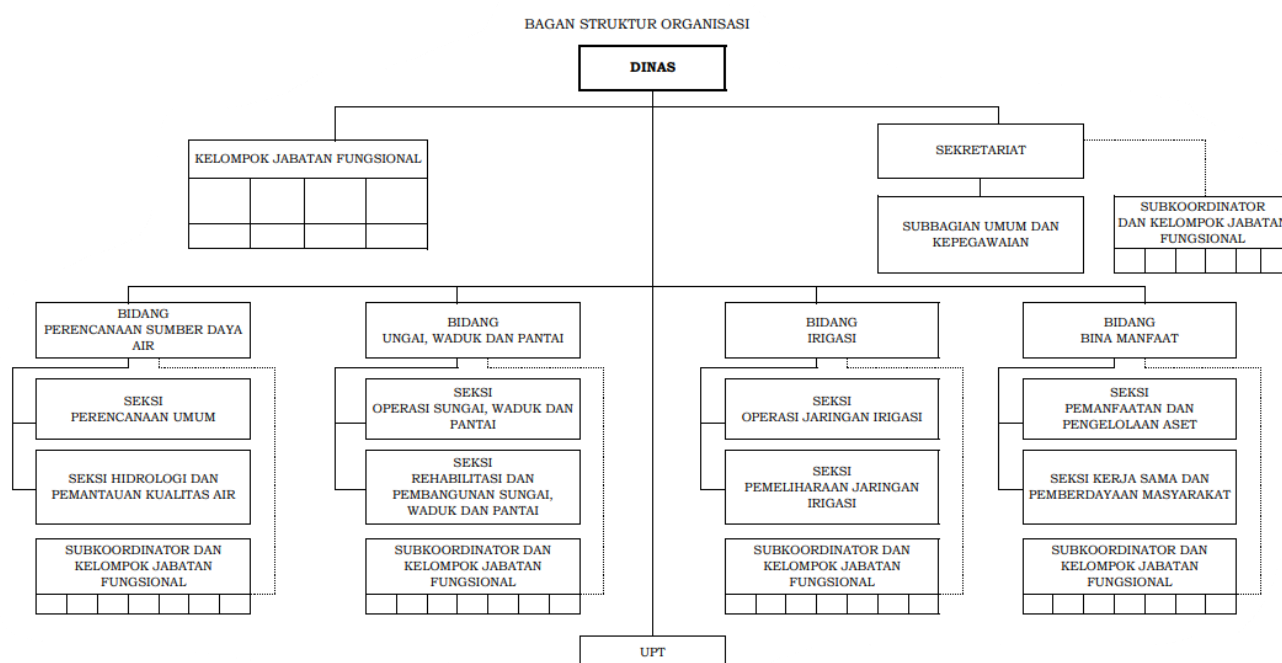
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah melalui proses *assesment* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diambil keputusan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (Nomenklatur sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014) berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dengan level Dinas Daerah Tipe A dimana Kepala Dinas (Es. IIa) membawahi Sekretaris (Es. IIIa) dan 4 (empat) Bidang setingkat Eselon IIIa.

Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang mulai berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2017. Dan diperbaharui lagi dengan Pergub No 5 Tahun 2021 dengan tambahan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air berdasarkan Pergub No 105 Tahun 2021

Mengingat rentang kendalinya yang cukup luas meliputi 38 Kabupaten/Kota seluas 47.779,975 km² wilayah daratan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air ditunjang dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di 6 (enam) kota di Jawa Timur yaitu Bojonegoro, Kediri, Pasuruan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang.

Sebelum berlakunya Pergub Nomor 49 Tahun 2018, UPT Dinas berjumlah 10 (sepuluh) unit terdiri dari 9 (sembilan) UPT Kewilayahan dan 1 (satu) UPT Peralatan. Sehubungan dengan rasionalisasi Jumlah UPT Provinsi sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilakukan penggabungan dan penghapusan UPT sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Matriks Perubahan Kelembagaan dan Wilayah Kerja UPT

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
1	UPT PSDA di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik	UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik
2	UPT PSDA di Madiun	Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan		Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan
3	UPT PSDA di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang	UPT PSDA WS Brantas di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang
4	UPT PSDA di Malang	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung	Dihapus (menjadi kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung
5	UPT PSDA di Surabaya	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo	Dihapus (menjadi kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo
6	UPT PSDA di Pamekasan	Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep	UPT PSDA WS Madura - Bawean	Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
7	UPT PSDA di Pasuruan	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo	UPT PSDA WS Welang Pekalen	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo, Kec Lawang
8	UPT PSDA di Lumajang	Kab Lumajang, Kab Jember	UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Kab Lumajang, Kab Jember, Kab Banyuwangi (Sebagian) Kab. Malang (Sebagian)
9	UPT PSDA di Bondowoso	Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi	UPT PSDA WS Sampean Setail	Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi
10	UPT Depo Peralatan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi	Dihapus (dilaksanakan oleh PPK Depo Peralatan yang dijabat oleh Es IV di Bidang Sungai Waduk Pantai)	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi

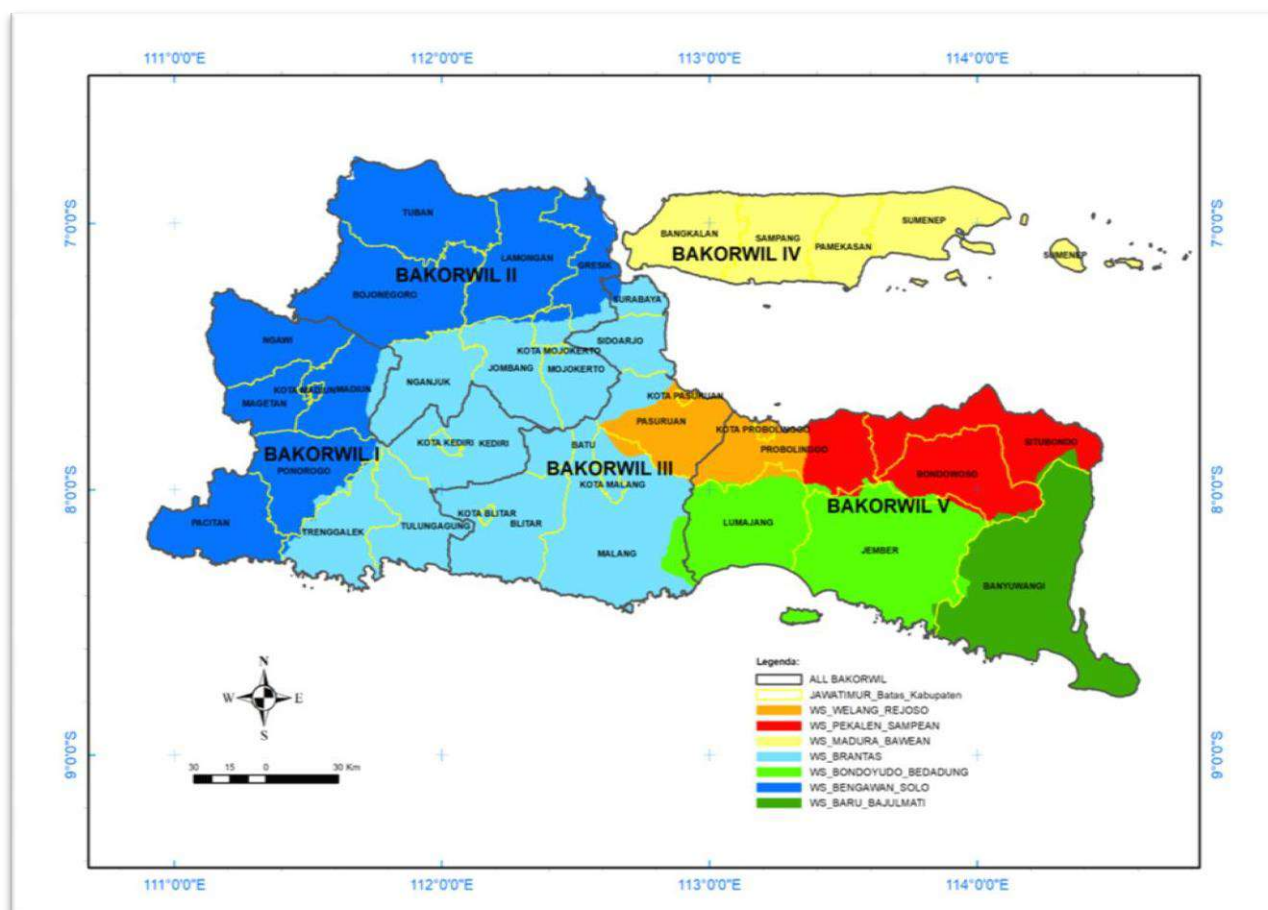
Salah satu hal yang mendasari perubahan UPT ini adalah adanya pemahaman, dari *Assessor* pada saat itu, mengenai beban kerja UPT Dinas di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan 7 (Tujuh) Wilayah Sungai yang terdiri dari 2 (dua) Wilayah Sungai Kewenangan Pusat dan 5 (lima) Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi. Sedangkan Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota tidak ada di Provinsi Jawa Timur.

Wilayah Sungai dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai Kesatuan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau – pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km². Sedangkan Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak – anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Beban Kerja UPT yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat, ditetapkan pada saat itu, merupakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan menganggap kegiatan lingkup Sumber Daya Air lain yang bersifat kewilayahan bukan menjadi tanggung jawab Provinsi karena merupakan Kewenangan Pusat. Hal tersebut berdampak pada penggabungan UPT Dinas yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat hanya menjadi 1 (satu) UPT (**Tabel 2.1**).

Kegiatan Lingkup Sumber Daya Air yang bersifat kewilayahan dan dianggap bukan menjadi tanggung jawab Provinsi antara lain : Survey dan Inventarisasi dalam rangka mitigasi bencana (Tanggul Kritis Sungai), Pengelolaan data hidrologi pada pos hujan di luar Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi, Kegiatan Tanggap Darurat sementara penanganan tanggul putus, pembangunan tampungan air kecil dan usaha konservasi mata air.

Ketiadaan kegiatan di atas di Wilayah Sungai Pusat, yang sebenarnya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, membawa konsekuensi bahwa kegiatan tersebut tetap dilaksanakan secara terbatas oleh UPT untuk keperluan pelaporan ke Kepala Dinas sebagai Atasan Langsung.



Gambar 2 Wilayah Kerja UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dalam 3 *layer* batas (*Layer* Wilayah Sungai, Bakorwil dan Batas Kabupaten/Kota)

Selanjutnya, Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing unit pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dapat dijabarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 sebagai berikut :

Tugas Utama Dinas PU Sumber Daya Air adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pekerjaan Umum dan Tugas Pembantuan, yang diselenggarakan dengan melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

sebagaimana dimaksud Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, 12, 13 Undang – Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa tugas dan wewenang Pemerintah Daerah adalah:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menJrusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten lkota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota;
- h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaterr/ kota;
- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
- l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan

m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas PU Sumber Daya Air diklasifikasikan sebagai berikut :

A. Data Personil (Tenaga ASN, Pegawai Tidak Tetap, Pekarya)

Sampai dengan Akhir Tahun 2021, terdapat 552 personil ASN yang bertugas di 11 unit kerja di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Selain itu, terdapat Dua jenis Tenaga Lapangan yang membantu Tugas Fungsi Dinas, yaitu Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT PK) dan Pekarya Irigasi. Tenaga PTT – PK sebagian besar bertugas menjadi Penjaga Pintu Air tersebar di

Jawa Timur sejumlah 295 orang. Sedangkan Pekarya Irigasi yang bertugas membersihkan saluran irigasi, babat rumput dan melaksanakan pemeliharaan ringan irigasi berjumlah 206 orang. Data Rinci Sebaran ASN ditampilkan dalam **Tabel 2.2.**

Tabel 2.2 Jumlah dan Komposisi Personil (ASN dan Pegawai Tidak Tetap

No	Klasifikasi Pangkat	Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin			Klasifikasi berdasarkan kelompok Umur			
		L	P	Total	< 30	30-40	40-50	55 >
Jumlah ASN		442	112	552	7	145	302	98
1	IV/c - Pembina Utama Muda	0	0	0	-	-	-	-
2	IV/b - Pembina Tingkat I	1	0	1	-	-	1	-
3	IV/a - Pembina	10	7	17	-	-	7	10
4	III/d - Penata Tingkat I	24	11	33	-	-	20	13
5	III/c – Penata	17	17	34	-	14	11	9
6	III/b - Penata Muda Tingkat I	23	11	34	-	15	10	9
7	III/a - Penata Muda	62	33	95	7	34	48	6
8	II/d - Pengatur Tingkat I	113	11	124	-	34	78	12
9	II/c - Pengatur	127	21	148	-	37	97	14
10	II/b - Pengatur Muda Tingkat I	43	0	43	-	11	24	8
11	II/a - Pengatur Muda	7	1	8	-	-	2	6
12	I/d - Juru Tingkat I	15	0	15	-	-	4	11
13	I/c – Juru	0	0	0	-	-	-	-
Jumlah Bukan ASN				501				
1	PPK Non BLUD	2	293	295	-	84	184	27
2	Pekarya Irigasi	-	206	206	-	69	114	23

B. Data Sumber Air (Sungai, Mata Air, Waduk, Embung)

Secara umum, Infrastruktur Sumber Daya Air yang berperan dalam penyediaan air baku di Jawa Timur adalah Sungai, Mata Air, Waduk dan Embung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Jawa Timur terdapat 688 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan sebaran : 96 DAS di Wilayah Sungai Bengawan Solo, 220 DAS di WS

Brantas, 489 DAS di WS Kepulauan Madura, 47 DAS di WS Bondoyudo Bedadung, 56 DAS di WS Pekalen Sampean, dan 60 DAS di WS Baru Bajulmati.

Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo dan WS Brantas. Sedangkan Wilayah Sungai lainnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Di

Jawa Timur tidak ada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Infrastruktur sumber air selanjutnya adalah Mata Air. Berdasarkan data terakhir tahun 2010, terdapat 2213 lokasi mata air dengan Total potensi debit (hanya sebagian yang dapat diukur) sebesar 4300 m³/det. Sebaran mata air menurut Wilayah Sungai dijelaskan sebagai berikut : 164 mata air di WS Bengawan Solo, 62 mata air di WS Brantas, 165 mata air di WS Welang Rejoso, 178 mata air di WS Pekalen Sampean, 194 mata air di WS Baru Bajulmati, 639 mata air di WS Bondoyudo Bedadung dan 143 mata air di WS Kepulauan Madura.

Waduk, Bendungan, Embung dan Telaga secara umum dibedakan berdasarkan kapasitas tampungan yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan, Waduk (apabila disertai infrastruktur lengkap disebut Bendungan) diklasifikasikan dengan syarat memiliki Tinggi Bendung 15 meter atau lebih yang diukur dari pondasi terdalam, atau tampungan yang memiliki tinggi bendung 10 sampai dengan 15 meter dengan panjang crest minimal 500 meter, tampungan minimal 500.000 m³ atau Debit banjir maksimal 1000 m³/detik.

Tampungan yang tidak memenuhi Peraturan Menteri di atas disebut dengan Embung, sedangkan Tampungan yang terbentuk alami disebut dengan Telaga. Di Jawa Timur, terdapat 87 tampungan berbagai klasifikasi dengan total tampungan sebesar 1.113.389.630 m³.

Sampai dengan Akhir Juni 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang melaksanakan pembangunan 6 unit Bendungan di Jawa Timur yang menelan biaya 7,15 Trilyun Rupiah dengan lokasi yaitu Bendo (Ponorogo), Tukul (Pacitan), Tugu (Trenggalek), Bagong (Trenggalek), Gonseng (Bojonegoro) dan Semantok (Nganjuk). Pada saat beroperasi, Bendungan tersebut direncanakan membawa manfaat tambahan Luas Tanam Irigasi sebesar 18.712 ha, air baku sebesar 2.255 liter/detik dan Potensi tambahan listrik sebesar 2,11 MW (di Bendungan Tugu, Gongseng dan Semantok).

C. Data Irigasi (Luas DI Kewenangan, Bangunan Utama dan Saluran)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di Provinsi Jawa Timur terdapat 934.683 ha Sawah Beririgasi

yang dibagi menjadi 289.508 ha Kewenangan Pusat, 164.823 ha Kewenangan Provinsi, dan 480.352 ha Kewenangan Kabupaten.

Sawah beririgasi Kewenangan Provinsi tersebar dalam 168 Daerah Irigasi dengan Jumlah Bangunan Utama/Bendung sejumlah 170 buah, Panjang Saluran Primer Total sama dengan 345,21 km; Saluran Sekunder 1354,66 km dan Saluran Pembuang sepanjang 92,99 km.

Selain bangunan utama dan saluran pembawa, terdapat bangunan pendukung antara lain Bangunan Bagi, Bangunan Sadap, Bangunan Bagi Sadap, Talang, Siphon dan Gorong – gorong yang berjumlah total 3255 unit.

D. Data Hidrologi dan Kualitas Air

Pada tahun 2019 dikelola 535 pos hujan (dari 977 pos hujan pada tahun anggaran 2018), 46 pos duga air, dan 5 stasiun klimatologi. Selain itu, terdapat 54 titik pemantauan kualitas air badan air (ABA). Data tersebut, berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, secara rutin dikonsolidasikan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Karangploso Malang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Data Indikator Kinerja Daerah dan Rasio Penyerapan Anggaran disajikan pada **Tabel 2.3** dan **Tabel 2.4**. Data tersebut merupakan tolok ukur dalam menilai Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Selama Kurun 2014 – 2019, Kinerja Daerah telah tercapai rata – rata 100% untuk semua indikator. Sedangkan Penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 93,63% rerata dengan Total Rerata Anggaran yang dikelola per tahun sebesar Rp. 191.543.649.563 dengan penyerapan sebesar Rp. 179.350.368.907.

**TABEL 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Perangkat Daerah					Rasio Capaian Perangkat Daerah				
				Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku			87,40	87,66	87,89	87,90	88,00		87,61	87,78	87,84	87,84		1,00	1,00	1,00	1,00
2	Persentase pelayanan air untuk irigasi				82,00	82,00	82,00	82,00		82,00	82,20	82,82	84,71		1,00	1,00	1,01	1,03
3	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik			68,07	68,20	68,40	68,60	68,85		68,35	68,50	69,32	68,70		1,00	1,00	1,01	1,00
4	Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir			78,86	77,61	75,73	61,66	71,04		75,88	72,37	67,62	65,73		0,98	0,96	1,10	0,93

TABEL 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

No	Program	Anggaran Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan 93,63	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	TOTAL	210.207.011.600	268.326.705.260	155.130.530.536	195.528.018.421	128.525.982.000	191.891.727.715	255.735.027.999	145.438.831.061	183.872.004.341	119.814.253.417	91,29	95,31	93,75	94,04	93,22	191.543.649.563	179.350.368.907
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.525.315.080	4.112.636.250	3.648.977.250	4.075.918.950	3.284.982.633	3.364.764.607	3.728.829.896	3.406.069.880	3.892.766.538	3.101.262.114	95,45	90,67	93,34	95,51	94,41	3.729.566.033	3.697.455.938
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.356.933.900	5.590.902.800	5.192.436.700	4.786.428.650	7.453.018.367	4.936.210.798	5.258.821.615	4.738.943.566	4.444.420.578	7.197.963.263	92,15	94,06	91,27	92,85	96,58	5.675.944.083	5.591.799.463
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	207.000.000	1.387.017.000	631.020.000	1.670.813.400	1.771.925.000	939.616.470	1.008.948.399	474.489.549	1.399.562.214	1.666.284.303	453,92	72,74	75,19	83,77	94,04	1.133.555.080	1.280.078.374
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		310.855.500	171.291.000	146.836.000	360.231.000		297.862.300	148.397.000	140.522.000	331.636.100		95,82	86,63	95,70	92,06	247.303.375	247.303.375
5	Program Konservasi Sumber Daya Air		42.863.634.160	6.323.988.150	18.873.668.480			39.092.201.860	5.687.590.735	17.458.860.634			91,20	89,94	92,50		22.687.096.930	20.746.217.743
6	Program Pendayagunaan Sumber Daya Air		167.973.389.325	130.158.722.711	93.355.040.111			162.758.463.623	122.820.768.704	86.304.951.231			96,90	94,36	92,45		130.495.717.382	123.961.394.519
7	Program Pengendalian Daya Rusak Air		46.088.270.225	9.004.094.725	72.619.312.830			43.589.900.306	8.162.571.627	70.230.921.146			94,58	90,65	96,71		42.570.559.260	40.661.131.026
5	Program Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Air					5.211.175.000					4.376.512.743					83,98	5.211.175.000	4.376.512.743
6	Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di UPT PSDA					10.831.465.466					10.350.860.316					95,56	10.831.465.466	10.350.860.316
7	Program Hidrologi, Pemantauan Kualitas Air dan Sistem Informasi Sumber Daya Air					2.552.244.661					2.390.054.807					93,65	2.552.244.661	2.390.054.807
8	Program Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air					5.219.700.340					4.734.828.658					90,71	5.219.700.340	4.734.828.658
9	Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi					4.033.937.200					3.804.317.251					94,31	4.033.937.200	3.804.317.251
10	Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA					52.376.070.864					50.048.291.010					95,56	52.376.070.864	50.048.291.010
11	Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai					4.937.699.876					4.373.844.712					88,58	4.937.699.876	4.373.844.712
12	Program Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Sungai, Waduk Dan Pantai UPT Depo Peralatan					13.367.592.050					12.421.270.012					92,92	13.367.592.050	12.421.270.012
13	Program Pengendalian Daya Rusak Air					942.991.654					858.748.750					91,07	942.991.654	858.748.750
14	Program Pengendalian Daya Rusak Air di UPT PSDA					14.338.076.980					12.556.434.928					87,57	14.338.076.980	12.556.434.928
15	Program Operasi, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA					1.844.870.909					1.601.944.450					86,83	1.844.870.909	1.601.944.450
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.302.502.800					224.414.745					17,23					1.302.502.800	224.414.745
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	245.117.500					800.651.450					326,64					245.117.500	800.651.450
6	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	882.130.720					206.895.000					23,45					882.130.720	206.895.000
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	100.046.819.003					95.355.959.143					95,31					100.046.819.003	95.355.959.143
25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	19.997.760.410					16.718.533.989					83,60					19.997.760.410	16.718.533.989
26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	45.183.503.396					38.923.221.718					86,14					45.183.503.396	38.923.221.718
28	Program Pengendalian Banjir	23.104.734.011					21.056.277.932					91,13					23.104.734.011	21.056.277.932
31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	10.355.194.780					9.365.181.863					90,44					10.355.194.780	9.365.181.863

Kinerja serapan anggaran di atas 90% dapat dicapai karena dilaksanakan percepatan penyerapan anggaran di Triwulan Awal dengan strategi :

- a. Pekerjaan Pelelangan Umum dengan nilai di atas 200 juta dilaksanakan proses lelangnya di awal tahun dengan target pekerjaan dapat dilaksanakan/terkontrak pada awal musim kemarau (bulan April)
- b. Belanja Modal, Pembinaan Teknik Staf, Kegiatan Fisik Pengadaan Langsung dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II
- c. Pada Pertengahan Tahun (Akhir Triwulan II) dilaksanakan evaluasi serapan anggaran untuk kemudian dapat diproyeksikan anggaran yang akan dialokasikan ulang pada APBD Perubahan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan Pelayanan Pengelolaan Sumber Daya Air ke depan, didapatkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra yaitu :

a. Tuntutan untuk merespon kejadian banjir lebih cepat

Akan dilaksanakan penambahan kapasitas untuk kegiatan Siaga Banjir. Kegiatan ini akan menjadi tanggung jawab Bidang Sungai, Waduk dan Pantai yang saat ini membawahi unit Alat Berat dan Depo Peralatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa : pengadaan Steel Sheet Pile dan Alat Berat Pancang (Crane), pengadaan bahan banjiran dan upah yang bersifat stand by dan bersifat on call. Dengan penambahan kapasitas diharapkan Dinas PU Sumber Daya Air lebih siap dan responsif dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir yang bersifat sementara tetapi memiliki usia guna yang lebih panjang sampai dengan penanganan banjir permanen dilaksanakan.

b. Tantangan untuk menambah cakupan pantauan kualitas air

Meskipun kualitas air bukan merupakan Tugas Pokok Utama Dinas PU Sumber Daya Air, dalam rangka mendukung upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur dari Angka Awal 66,36 (2020) menjadi 68,22 – 68,58 (2024) maka pada tahun 2020 akan dibuat Laboratorium Mini Kualitas Air yang akan berlokasi di Kantor Pusat Surabaya. Laboratorium ini bertujuan :

- (a) memanfaatkan kembali peralatan kualitas air di UPT;
- (b) meningkatkan kemampuan tenaga pengelola pemantauan kualitas air
- (c) menambah cakupan titik pantau dalam rangka pengendalian
- (d) menyajikan data awal kondisi kualitas air

c. Penurunan Kinerja Layanan Irigasi akibat Perubahan SOTK

Mengingat semakin berkurangnya jumlah dan komposisi tenaga lapangan karena purna tugas dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten/Kota, perlu dilakukan upaya untuk meng-*upgrade* Tenaga Petugas Pintu Air menjadi Juru Pengairan. Berdasarkan Data 2017, kekurangan tenaga kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mencapai 981 orang dari Kebutuhan Tenaga sebanyak 1941 orang dengan sebaran : 13 Pengamat Irigasi, 85 Petugas Operasi Bendung, 90 Juru Pengairan, 262 Petugas Pintu Air dan 531 Pekarya Saluran.

Pemenuhan Tenaga Operasi dan Pemeliharaan merupakan prasyarat untuk memenuhi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (AKNOP) dalam rangka menuju OP Ideal

d. Perlunya prioritas penanganan banjir

Dalam rangka penanganan banjir, telah disusun daftar panjang 30 (tiga puluh) sungai di Jawa Timur yang rawan banjir. Daftar ini disusun berdasarkan Rekapitulasi Laporan Kejadian Banjir yang masuk pada 3 tahun terakhir dan dijelaskan pada **Tabel 2.5**.

No	Wilayah Sungai	SUNGAI	KABUPATEN
1	BONDOYUDO BARU	Sungai Tanggul	Jember
2	BONDOYUDO BARU	Sungai Sanenrejo	Jember
3	BONDOYUDO BARU	Sungai Mayang	Jember
4	BONDOYUDO BARU	Sungai Jatiroto	Lumajang
5	BONDOYUDO BARU	Sungai Rawaan	Lumajang
6	BONDOYUDO BARU	Sungai Bondoyudo	Lumajang
7	BONDOYUDO BARU	Sungai Glidik	Lumajang
8	BONDOYUDO BARU	Sungai	Lumajang
9	BONDOYUDO BARU	Sungai Asem	Lumajang
10	MADURA	Sungai Asemtanto	Bangkalan
11	MADURA	Sungai Blega	Bangkalan
12	MADURA	Sungai Semajid	Pamekasan
13	MADURA	Sungai Klampis	Sampang
14	MADURA	Sungai Patrean	Sumenep
15	MADURA	Sungai Sarokah	Sumenep
16	SAMPEAN SETAIL	Sungai Bate	Banyuwangi

Tabel 2.5 Sungai Rawan Banjir yang diprioritaskan 2020 - 2024

No	Wilayah Sungai	SUNGAI	KABUPATEN
17	SAMPEAN SETAIL	Sungai Bajulmati	Banyuwangi
18	SAMPEAN SETAIL	Sungai Blambangan	Banyuwangi
19	SAMPEAN SETAIL	Sungai Bluncong	Bondowoso
20	SAMPEAN SETAIL	Sungai Sampean	Bondowoso
21	SAMPEAN SETAIL	Sungai Patemon	Situbondo
22	SAMPEAN SETAIL	Sungai Curah Udang	Situbondo
23	SAMPEAN SETAIL	Sungai Selowogo	Situbondo
24	WELANG PEKALEN	Sungai Welang	Pasuruan
25	WELANG PEKALEN	Sungai Rejoso	Pasuruan
26	WELANG PEKALEN	Sungai Petung	Pasuruan
27	WELANG PEKALEN	Sungai Gembong	Pasuruan
28	WELANG PEKALEN	Sungai Kasuran	Pasuruan
29	WELANG PEKALEN	Sungai Laweyan	Pasuruan
30	WELANG PEKALEN	Sungai Pekalen	Probolinggo

e. Mempertahankan Ketahanan Pangan

Untuk mendukung ketahanan pangan, maka rencana Pengelolaan Jaringan Irigasi disusun dengan membuat daftar dan jadwal pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Irigasi selama 5 tahun ke depan. Rencana ini didasarkan pada data 122 (seratus dua puluh dua) Jaringan Irigasi yang sudah dilaksanakan kegiatan PAI (Pengelolaan Aset Irigasi) dari 164 Jaringan Irigasi yang menjadi Kewenangan Provinsi sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6 Data Jaringan Irigasi yang sudah di studi PAI (Pengelolaan Aset Irigasi)

NO.	DAERAH IRIGASI	KAB. / KOTA	JUMLAH LUAS (HA)	TAHUN STUDI	PRAKIRAAN BIAYA TAHUN 2018 (Rp)
I	UPT PSDA WS BRANTAS DI KEDIRI				
1	Bakalan	Kab/Kota Malang	148	2016	1.002.562.500
2	Bodo	Kab/Kota Malang	156	2010	266.061.000
3	Kajar	Kab/Kota Malang	20	2016	1.962.868.500
4	Pakis	Kab/Kota Malang	726	2016	4.925.356.500
5	Kalilanang	Kab Malang/Kota Batu	457	2010	81.000.000
6	Kebalon	Kab/Kota Malang	107	2016	6.688.191.000
7	Losawi	Kab/Kota Malang	39	2016	1.203.982.500
8	Ngukir	Kab Malang/Kota Batu	282	2010	76.800.000
9	Sengkaling Kanan	Kab/Kota Malang	193	2013	133.738.014.000
10	Sengkaling Kiri	Kab/Kota Malang	455	2013	-
11	Gelang	Kab Tulungagung	1378	2014	438.768.000
12	Jatinom	Kab/Kota Blitar	56	2017	347.148.000
13	Jempor	Kab/Kota Blitar	54	2017	317.560.500
14	Widoro	Kab Trenggalek/ Kab Tulunga	2946	2010	3.345.499.500
15	Kaliboto	Kab Tulungagung	165	2014	7.875.000
16	Paingan	Kab Trenggalek/ Kab Tulunga	551	2014	4.275.000
17	Tambak Rejo	Kab/Kota Blitar	23	2017	173.179.500
18	Ploso Tengah	Kab/Kota Blitar	51	2017	510.270.000
19	Ngrebo	Kab/Kota Blitar	62	2017	548.532.000
20	Sawahan	Kab/Kota Blitar	82	2017	1.076.943.000
21	Rembang	Kab/Kota Blitar	42	2017	182.356.500
22	Sukorame	Kab/Kota Blitar	69	2017	427.324.500
23	Sbr. Gayam	Kab Trenggalek/ Kab Tulunga	1926	2014	201.085.500
24	Sumbertulung	Kab/Kota Blitar	38	2016	450.355.500
25	Sumber berjo	Kab/Kota Blitar	45	2016	528.406.500
26	Jaten	Kab Blitar/ Kab Kediri	461	2016	80.970.000
27	Turi	Kab/Kota Malang	119	2016	332.230.500
28	Dermen	Blitar	1763	2017	73.495.444.500
29	Pohblembem	Kab Kediri	1086	2012	1.755.714.000
30	Ketandan	Kab Kediri	1637	2012	1.759.491.000
31	Gunting	Kab/Kota Kediri	369	2016	12.034.800.000
32	Kembangan	Kab/Kota Kediri	281	2016	9.822.307.500
33	Klitik Kresek	Kab/Kota Kediri	108	2016	631.042.500
34	Klitik Bendokrosok	Kab/Kota Kediri	332	2016	22.665.000
35	Kedung Gerit	Kab Nganjuk	1470	2014	75.154.500
36	Jatimlerek	Kab Jombang	1812	2012	3.293.497.500
37	Slumbung	Kab Jombang	1182	2017	140.925.000
38	Kejagan	Kab Jombang/Kab Mojokerto	288	2016	12.546.000
39	Tawang Sari	Kab Jombang/Kab Mojokerto	62	2018	11.700.000
40	Kaweden	Kab Jombang/Kab Mojokerto	69	2018	7.890.000
41	Badas	Kab Jombang/Kab Kediri	445	2016	678.376.500
42	Betis/Ngreco	Kab/Kota Kediri	38	2017	140.440.500
43	Bujel	Kab/Kota Kediri	113	2017	217.687.500
44	Ngablak	Kab/Kota Kediri	245	2017	466.191.000
45	Pesantren	Kab/Kota Kediri	69	2017	155.250.000
46	Penewon	Kab/Kota Mojokerto	971	2018	5.829.273.000
47	Sinoman	Kab/Kota Mojokerto	293	2018	435.274.500
48	Subantoro	Kab/Kota Mojokerto	515	2018	8.219.052.000
JUMLAH			23.799		278.122.338.000

NO.	DAERAH IRIGASI	KAB. / KOTA	JUMLAH LUAS (HA)	TAHUN STUDI	PRAKIRAAN BIAYA TAHUN 2018 (Rp)
II	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN DI PASURUAN				
1	Klosod	Kab Pasuruan	1008	2015	549.870.000
2	Pateguan	Kab Pasuruan	1449	2011	346.963.500
3	Ranugrati	Kab Pasuruan	1085	2013	1.659.030.000
4	Selowongko	Kab Pasuruan	1090	2015	2.452.500.000
5	Telebuk	Kab Pasuruan	1132	2013	2.117.632.500
6	Baong	Kab Pasuruan	1843	2013	542.826.000
7	Domas	Kab Pasuruan	1057	2013	3.426.762.000
8	Grinting	Kab/Kota Pasuruan	695	2013	747.301.500
9	Arah Makam Bawah	Kab Probolinggo	1523	2015	1.966.554.000
10	Topi	Kab Probolinggo	1513	2015	2.563.111.500
11	Ramah Bawah	Kab Probolinggo	1126	2015	2.480.908.500
12	I.S Pakis	Kab/Kota Probolinggo	190	2018	3.296.383.500
13	Lontong	Kab/Kota Probolinggo	151	2018	1.187.586.000
14	Mbok Siti	Kab/Kota Probolinggo	445	2018	39.992.461.500
15	Taposan	Kab/Kota Probolinggo	696	2018	8.411.025.000
16	Warujinggo	Kab/Kota Probolinggo	62	2018	619.471.500
17	Bango	Kab/Kota Probolinggo	64	2018	3.038.289.000
18	Surak	Kab Pasuruan/Kab Malang	876	2018	5.873.203.500
	JUMLAH		16.005		81.271.879.500
III	UPT PSDA WS BONDOYUDO BARU DI LUMAJANG				
1	Brug Purwo	Kab Lumajang	1094	2013	2.778.654.000
2	Jurang Dawir.	Kab Lumajang	1088	2013	1.614.730.500
3	Tekung	Kab Lumajang	1920	2013	2.414.896.500
4	Umbul Pringtali.	Kab Lumajang	1262	2013	1.828.021.500
5	Kembar	Kab Jember	1447	2016	1.159.492.500
6	Kertosari	Kab Jember	2056	2014	413.062.500
7	Bago	Kab Jember	2188	2016	702.267.000
	JUMLAH		11.055		10.911.124.500
IV	UPT PSDA SAMPEAN SETAIL DI BONDOWOSO.				
1	Balud	Kab Bondowoso	1074	2014	438.057.000
2	Wonosroyo	Kab Bondowoso	1499	2014	901.768.500
3	Nangger	Kab Situbondo	2184	2010	14.073.000
4	Bajulmati	Kab Situbondo/ Kab Banyuwangi	777	2014	857.121.000
5	Gembleng	Kab Banyuwangi	1736	2016	1.035.025.500
6	Tengoro	Kab Banyuwangi	1074	2014	472.216.500
7	Blambangan	Kab Banyuwangi	1523	2012	409.179.000
8	Sumber Pakem	Kab Bondowoso/ Kab Jember	1151	2013	360.922.500
	JUMLAH		11.018		4.488.363.000
V	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO				
1	Notopuro	Kab Madiun	2433	2015	547.300.500
2	Cau	Kab/Kota Madiun	1232	2011	4.952.023.500
3	Brangkal Bawah	Kab/Kota Madiun	1155	2014	2.598.750.000
4	Piring 1	Kab/Kota Madiun	194	2014	432.273.000
5	Sono	Kab/Kota Madiun	684	2010	86.238.000
6	Gandongkerik	Kab Magetan/Kab Madiun	745	2015	180.751.500
7	Turi	Kab Magetan/Kab Ngawi	367	2014	894.367.500

NO.	DAERAH IRIGASI	KAB. / KOTA	JUMLAH LUAS (HA)	TAHUN STUDI	PRAKIRAAN BIAYA TAHUN 2018 (Rp)
8	Kuluhan	Kab Magetan/Kab Ngawi	209	2015	56.325.000
9	Dung Timun	Kab Magetan/Kab Ngawi	215	2014	333.007.500
10	Dung lo	Kab Magetan/Kab Ngawi	165	2014	345.015.000
11	Kerep	Kab Magetan/Kab Ngawi	2340	2010	737.881.500
12	Klalung	Kab Magetan/Kab Ngawi	629	2012	1.415.250.000
13	Taji/Tinil	Kab Magetan/Kab Ngawi	789	2015	402.789.000
14	Jabung	Kab Magetan/Kab Ngawi	13	2013	148.035.000
15	Kedungrejo	Kab Ngawi/ Kab Madiun	1554	2015	814.756.500
16	Bekoh	Kab Ngawi	1921	2012	4.322.250.000
17	Gurdo	Kab Ngawi	1593	2012	3.584.250.000
18	Guyung	Kab Ngawi	1246	2012	2.803.500.000
19	Kedung Bendo	Kab Ngawi	1341	2012	82.207.500
20	Teguhan	Kab Ngawi	1337	2012	3.008.250.000
21	Widodaren	Kab Ngawi	1372	2012	732.031.500
22	Cepogo	Kab Ponorogo	1000	2014	2.250.000.000
23	Dalem	Kab Ponorogo	1403	2014	18.322.234.500
24	Watu Putih	Kab Ponorogo	1096	2012	3.495.826.500
25	Sumorobangun	Kab Ponorogo	1787	2012	1.500.454.500
26	Mojopurno	Kab/Kota Madiun	50	2015	353.490.000
27	Kalangan	Kab Magetan/Kab Ngawi	20	2015	111.240.000
28	Galok Atas/Soponyono	Kab Magetan/Kab Ponorogo	54	2015	794.400.000
29	Pang	Kab Ngawi	1046	2015	3.109.572.000
30	C a w a k	Kab Bojonegoro	1733	2011	6.852.244.500
31	Wd. Leran	Kab Bojonegoro	1144	2012	1.150.866.000
32	Pirang	Kab Bojonegoro	1347	2010	200.353.500
33	M a i b i t	Kab Tuban	1229	2013	3.186.598.500
34	N g l i r i p	Kab Tuban	1292	2013	2.452.027.500
35	Merak Urak	Kab Tuban	1475	2013	1.559.149.500
36	Rawa Jabung	Kab Lamongan	2143	2014	464.586.000
37	Wd. Sumengko	Kab Lamongan/ Kab Gresik	1146	2014	6.975.000
38	Wd.Gogor	Kab Gresik	1054	2013	866.935.500
39	Wd.Lowayu	Kab Gresik	1430	2013	99.385.500
40	Kali Wadak	Kab Gresik	1476	2013	107.544.000
	JUMLAH		43.459		75.253.591.500
VI	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA DI PAMEKASAN				
1	Dam Umbul	Kab Bangkalan	1085	2012	1.223.211.000
2	Tunjung	Kab Bangkalan	1807	2012	960.936.000
3	Samiran	Kab Pamekasan	2462	2010	54.897.000
4	Jepun	Kab Sumenep	1424	2013	9.207.420.000
	JUMLAH		6.778		11.446.464.000
	TOTAL JAWA TIMUR		112.114		461.493.760.500

f. Tantangan Keberlanjutan Data Hidrologi di Wilayah Sungai Pusat

Setelah berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, tugas dan fungsi UPT Provinsi pada Wilayah Sungai Kewenangan Pusat menjadi lebih terbatas pada Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Pemeliharaan Aset dan Monitoring Banjir.

Akan tetapi masih terdapat kegiatan Kewenangan Pusat yang diharapkan tetap berlanjut karena terkait dengan rekaman data *time series*. Saat ini terdapat 259 pos hujan yang tersebar di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat yang sebelum tahun 2019 pengambilan datanya dilaksanakan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi. Seiring dengan perubahan peraturan dan penyerahan kewenangan, pada tahun 2018, 259 pos hujan tersebut diserahkan kembali untuk dikelola Pemerintah Pusat melalui Balai Besar yang ada di Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Brantas. Namun proses penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga mulai Tahun Anggaran 2020, Dinas PU Sumber Daya Air akan melaksanakan kembali pengelolaan pos hujan sejumlah 50 pos di Wilayah Sungai Bengawan Solo dan 67 pos di Wilayah Sungai Brantas.

g. Analisa Kesenjangan Gender di lingkup Sumber Daya Air

Kesenjangan Gender berangkat dari kesenjangan dalam pemberdayaan perempuan yang dapat berupa berbagai bentuk, misalkan: diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki;

Upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut di atas, pada sisi perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsif gender, yaitu anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumberdaya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Kegiatan Anggaran Responsif Gender bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumberdaya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Pada lingkup Sumber Daya Air, Kegiatan Kesetaraan Gender untuk periode 2019 – 2024 dipilih Kegiatan Pemeliharaan Irigasi, Kepengurusan Komisi Irigasi dan Kepengurusan HIPPA.

Bab 3

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah pada Bulan Februari tahun 2015 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang – Undang 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan menyatakan berlakunya kembali Undang – Undang 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, lingkup Sumber Daya Air khususnya di bidang Pekerjaan Umum mengalami kondisi *status quo*. Hal ini disebabkan karena aturan turunan produk Undang – Undang 7/2004 juga turut dibatalkan. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung terlalu lama karena kemudian pada bulan April 2015, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri yang dijadikan payung hukum untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.

Pada saat Naskah Rencana Strategis ini disusun, Undang – Undang Sumber Daya Air pengganti UU 11/1974 sedang dalam pembahasan tingkat akhir antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. Selanjutnya disahkanlah Undang-Undang baru UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang otomatis membatalkan Undang-undang sebelumnya ,ditetapkan dijadikan payung hukum untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air, Selain permasalahan payung hukum, masalah pokok Sumber Daya Air di Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut :

- a. Jumlah, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air masih belum optimal. Penyediaan air baku masih menjadi tantangan di Jawa Timur setiap tahunnya. Kemampuan menyediakan air baku tidak dapat mengejar tingginya lajukebutuhan air yang terus bertambah. Sementara pemanfaat air baik yang memiliki ijin pemanfaatan maupun yang memanfaatkan untuk kepentingan sosial memiliki kecenderungan untuk menggunakan air melebihi ketentuan/ atau boros. Hal tersebut diperparah dengan sebaran ketersediaan air yang tidak merata. Daerah Pulau Madura, Dataran tinggi dan Daerah Pantai cenderung kekurangan air karena potensi air permukaan dan air tanah yang kurang. Sedangkan di daerah dataran rendah, potensi air baku cenderung surplus terhadap kebutuhan. Pada lokasi dimana air bersih mudah didapatkan seperti di hilir Sumber Air Umbulan Pasuruan, penggunaan air cenderung berlebihan.

Selain penggunaan air yang belum dapat dikendalikan, berkurangnya tutupan lahan di Hulu Daerah Aliran Sungai pada sebagian besar DAS di Jawa Timur menyebabkan bertambahnya Debit Banjir dan Debit Sedimen. Air hujan yang seharusnya ditahan/meresap ke dalam tanah (infiltrasi) sebagian besar berubah menjadi limpasan permukaan (*run off*) dan mengalir ke sungai. Dengan debit banjir yang lebih besar, aliran banjir mampu menyebabkan erosi tebing dan memindahkan deposit material (termasuk batu besar) lebih jauh ke arah hilir. Deposit material yang tersedimentasi di hilir DAS dan di meander/belokan sungai juga bertambah. Pada Sungai yang variasi debitnya tahunannya cukup besar (intermitten), deposit material tersebar merata sepanjang sungai karena pada saat aliran rendah, material akan terdeposit di badan air.

b. Belum Optimalnya pengelolaan Irigasi

Tidak hanya permasalahan pemenuhan Anggaran Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (AKNOP), infrastruktur irigasi di Jawa Timur (terutama bangunan utama) sudah mendekati usia guna bangunan sehingga saatnya dilakukan rehabilitasi total tuntas per Daerah Irigasi. Pondasi bangunan utama terutama di bagian kolam olah secara umum terjadi gerusan dan menyebabkan hilangnya lantai bendung, pintu penguras bergeser/miring sehingga tidak dapat dioperasikan, dan puncak pelimpah bendung sebagian hilang sehingga air tidak dapat masuk ke Saluran Irigasi sesuai tinggi rencana.

Selain kondisi fisik bangunan dan jaringan yang memerlukan rehabilitasi, kondisi lingkungan di sekitar jaringan irigasi juga memerlukan perhatian. Pengawasan yang belum optimal (karena cakupan wilayah dan personil yang tidak memadai) mengakibatkan pemanfaatan sempadan irigasi tidak terkendali. Pada sebagian besar lokasi ditemui bangunan liar, tanaman keras (misal sengon) maupun tanaman yang berpotensi merusak pasangan tebing (misal rumput gajah). Perusakan dan pencurian pintu air irigasi masih terjadi di beberapa tempat terutama di lokasi yang jauh dari pemukiman dan minim penjagaan dari petani saat pembagian air gilir glondong.

Kelembagaan, personil lapangan dan koordinasi antar OPD masih menjadi Pekerjaan Rumah bagi berbagai level institusi pengelola Sumber Daya Air di Jawa Timur. Pemenuhan personil lapangan sesuai AKNOP masih jauh dari kebutuhan ideal. Jumlah Petugas Operasi Bendung (POB), Penjaga Pintu Air (PPA), dan Pekarya

Saluran Irigasi masih jauh dari kebutuhan personil lapangan ideal (lihat Bab 2). Di tingkat pengamat/kantor lapangan, kebutuhan Pengamat Pengairan dan Juru Pengairan yang sebelumnya dilaksanakan staf OPD Kabupaten/Kota juga berkurang karena pengurangan staf secara alami (purna tugas) dan penyesuaian kantor UPT/UPTD karena perubahan peraturan. Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) juga perlu diperkuat dengan peningkatan peran Komir dalam penetapan kebijakan di level Kabupaten, mengesahkan Rencana Tata Tanam Global (RTTG), dan penyelesaian permasalahan irigasi lainnya.

c. Masih terdapat lokasi rawan banjir permanen

Banjir merupakan salah satu bencana yang paling cepat meningkatkan angka kemiskinan secara mendadak. Sehingga upaya minimal yang bisa dilakukan adalah menyiapkan sistem peringatan dini kejadian banjir untuk meminimalkan resiko kerugian masyarakat.

Kondisi sungai di Jawa Timur secara umum adalah daya tampung sungai berkurang secara vertikal (Sedimentasi) sementara penambahan tampungan secara horisontal (pelebaran dan pemanfaatan sempadan) sulit dilakukan. Upaya normalisasi cukup efektif mengurangi resiko banjir di beberapa lokasi sungai, sementara pada lokasi membutuhkan infrastruktur perkuatan tanggul seperti parapet. Kemampuan Provinsi untuk membangun infrastruktur besar pengendali banjir seperti waduk, bendung dan tampungan memanjang masih harus ditingkatkan mengingat infrastruktur tersebut membutuhkan biaya cukup besar.

Selain lokasi genangan rutin yang ditangani dengan normalisasi dan parapet, terdapat lokasi yang merupakan kawasan rawan banjir. Lokasi rawan banjir ini merupakan lokasi yang apabila tidak segera ditangani/dikelola dapat meningkatkan resiko banjir atau dapat menghambat penanganan banjir di kemudian hari. Lokasi rawan banjir ditangani dengan kegiatan perkuatan tebing, pengamanan aset, penertiban bangunan liar dan pemasangan patok kepemilikan tanah.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air masih belum optimal	Belum terkendalinya pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air	Pengendalian Penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air belum optimal
			Pengendalian dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air belum optimal
		Perlu peningkatan kualitas data dan koordinasi lintas sektor	Relokasi pos hujan belum berbasis hasil rasionalisasi hidrologi
			Perlu peningkatan kualitas pemantauan pos hujan dan duga air yang mendukung flood early warning system dan pengumpulan data
			Perlu peningkatan kualitas data dan peningkatan kemampuan analisa alokasi air
			Kaji ulang DED sungai dan Irigasi belum seluruhnya dilakukan pada lokasi prioritas
			Upaya konservasi sipil teknis dan vegetatif di hulu belum optimal
2	Belum optimalnya pengelolaan Irigasi	Kinerja Jaringan Irigasi belum optimal	Banyak Bangunan Utama yang mengalami kerusakan Banyak kebocoran di Saluran Primer dan Sekunder Perbaiki Pintu air dan Pembuang
			Perlu pengerukan Rutin Saluran Primer dan Sekunder
		Optimalisasi kebutuhan air irigasi	Perlu Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi
			Pengelolaan Irigasi partisipatif yang melibatkan P3A belum optimal
			Perlu pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten
			Percepatan pengesahan Perda Irigasi
			Pemenuhan anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) minimal 50% dengan trend penambahan 5% per tahun
			Perkuatan Institusi OP Irigasi
			Penyediaan data OP yang sah (valid) dan akurat

			Inisiasi Modernisasi Irigasi
3	Masih terdapat lokasi banjir permanen	Perlu revitalisasi kapasitas tampung sungai dan perbaikan tanggul kritis	Revitalisasi waduk, sungai, embung, ranu kewenangan provinsi belum optimal
			Perlu Penertiban sempadan, penambahan Sertifikasi aset dan Pemasangan Patok Batas
			Perlu penentuan Sungai prioritas di WS Kewenangan Provinsi Penambahan lokasi tanggul dan pembuatan parapet yang diperbaiki
		Perlu peningkatan kualitas penanganan kejadian banjir	Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Kordinasi antar Lembaga perlu ditingkatkan
			Perlu perkuatan database sungai dan sistem pelaporan banjir
			Perlu peningkatan Respon time Tanggap Darurat setelah Laporan Masuk
			Pembentukan Satuan Pemantau Banjir
			Pengadaan Stock Bahan Banjiran Rp 1 M/UPT/Tahun
			Peremajaan alat berat dan pengadaan alat/bahan tanggap darurat banjir
			Pengoperasian Ruang Kendali Sungai
			Publikasi Data Sungai rawan banjir

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang ditetapkan menjadi Visi Pembangunan Jawa Timur 2019 – 2024 adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”

Untuk Lingkup Sumber Daya Air, Pencapaian Visi Pembangunan Jawa Timur 2019 –2024 masuk dalam kelompok pencapaian :

MISI 1 Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah

Dalam Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur, Misi 1 dijelaskan sebagai berikut :

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja.

Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ekonomi kedepan, implementasi pembangunan hendaknya memastikan agar tingkat ketimpangan sosial (social inequality) antara kelompok sosial kaya dan miskin, maupun perkotaan (urban) dan pedesaan (rural) semakin mengecil.

Selain itu pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan sektoral, tapi juga perhatian secara simultan terhadap pembangunan antar kawasan sehingga masing-masing kawasan di Jawa Timur dan maju dan sejahtera bersama. Sehingga tujuan utama dari pembangunan Jawa Timur adalah jangan sampai ada yang tak berdaya (powerless), terpinggirkan (marginalized), tersisih (excluded), terbungkam (voiceless), terasing (alienated), karena pembangunan adalah perjuangan pembebasan rakyat Jawa Timur dari proses kemiskinan sosial, ketidakberdayaan dan kemelaratan menuju kedaulatan warga.

Pembangunan Ekonomi dan Sosial secara berkesinambungan yaitu Pembangunan yang mengutamakan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial.

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah. Sejalan dengan amanah konstitusi, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di Jawa Timur. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (Public Private Partnership), pemerintah Jawa Timur berusaha membuka seluas-luasnya lapangan kerja yang memperhatikan konektivitas wilayah.

Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (aglomerasi) yang terhubung

dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Tujuan dari semua itu proses pembangunan di Jawa Timur akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat.

- Tujuan 1** Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan;
 - 2) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
 - 3) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan & Penggalian;
 - 4) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - 5) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
 - 6) Meningkatnya Nilai Tambah KUKM;
 - 7) Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
 - 8) Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - 9) **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air;**
dan
 - 10) Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara;

Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air yang akan dicapai dengan :

Strategi 19 Pemenuhan infrastruktur dasar dan Sumber Daya Air yang layak.

Sumber Daya Air merupakan infrastruktur dasar yang menjadi pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan di Jawa Timur. Lebih dari pada itu, keberlanjutan pelayanan air dan peningkatan kinerja jaringan irigasi harus dipertahankan dan tidak boleh menurun karena :

- a. Hampir 70% Produk Domestik Bruto Masyarakat Jawa Timur berasal dari sektor pertanian, maka keberlanjutan pelayanan air dan peningkatan kinerja jaringan irigasi tidak boleh menurun.
- b. Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional sehingga merupakan pendukung Ketahanan Pangan Nasional

Selain dukungan untuk sektor pertanian, Sumber Daya Air sebagai infrastruktur dasar juga mendapat tugas untuk menangani pengendalian daya rusak air baik berupa kekeringan maupun banjir.

Tugas ini dalam Nawa Bhakti Satya masuk dalam **Bhakti 4 : Jatim Akses** melalui Penguatan Akses dan Konektivitas antar Wilayah dengan *Program Icon* 1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) dan 2) Penanganan Banjir.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) akan dilaksanakan dengan nomenklatur Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, dengan bentuk kegiatan pelaksanaan pemeliharaan saluran dan bangunan, pemenuhan kebutuhan tenaga lapangan, pengadaan bahan pemeliharaan rutin, pencatatan data air irigasi dan pemeliharaan berat (rehabilitasi) bangunan utama dan saluran pembawa.

Sedangkan Penanganan Banjir dilaksanakan dengan Program Pengendalian Daya Rusak Air dan Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai. Dengan bentuk kegiatan normalisasi sungai, pembuatan parapet dan perkuatan tebing.

3.3 Telaah Renstra K/L

Berdasarkan Arah Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

a. Kebijakan Umum di Pulau Jawa

Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah Sebagai Lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan).

b. Arah Kebijakan Sumber Daya Air di Pulau Jawa

Dengan ketersediaan air yang rawan, jumlah penduduk yang padat, pengembangan SDA diarahkan pada peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada, penanganan banjir secara menyeluruh dan terpadu, pengembangan tampungan dengan kapasitas besar (bendungan), pengembangan SPAM regional untuk penyediaan air baku untuk air bersih, serta pendekatan demand management.

c. Dukungan terhadap Sektor lain

(i) Pertanian dan Agropolitan, difokuskan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi air tanah.

- (ii) Perikanan(kemaritiman), difokuskan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak pada lokasi yang disepakati dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (iii) Pariwisata, difokuskan pada kegiatan penyediaan air baku untuk air bersih dan penanganan banjir pada lokasi 50 Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (iv) Pengarusutamaan gender, difokuskan pada penyusunan anggaran berbasis gender untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki isu kesetaraan gender, termasuk dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Kebijakan Umum, Arah Kebijakan dan dukungan sektor Sumber Daya Air pada prinsipnya sudah selaras dengan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Program Icon Sumber Daya Air di Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur meliputi Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif (PSIP) dan Pengamanan Banjir.

Dari sudut pandang Pengelolaan Sumber Daya Air, Kebijakan Direktorat Sumber Daya Air mewakili 3 pilar Utama dan 2 pilar Pendukung Sumber Daya Air yaitu Penyediaan Air Baku, Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air. Sedangkan Pilar pendukungnya adalah Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan Kelembagaan/Pemberdayaan Masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 2 (dua) Rencana Sistem Jaringan yang memiliki korelasi dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yaitu Rencana Sistem Pengendalian banjir dan Rencana Sistem Jaringan Penyediaan air baku untuk air minum, industri dan Pertanian.

Rencana Sistem Pengendalian banjir merupakan rencana jangka panjang pembuatan tampungan air, parapet dan tanggul yang dalam dokumen ini diterjemahkan sebagai penanganan 30 (tiga puluh) sungai rawan banjir selama 2019 – 2024. Penanganan yang dimaksud merupakan kajian menyeluruh mulai dari Desain rencana penanganan, penyusunan Anggaran Biaya dan Rencana Pelaksanaan. Mengingat kegiatan pemeliharaan Sungai membutuhkan Anggaran yang sangat besar, apabila Anggaran Provinsi tidak dapat memenuhi, maka kebutuhan Anggaran akan diusulkan penanganannya ke Pemerintah Pusat. Sehingga target penanganan minimal periode 2019 – 2024 adalah penyiapan dokumen Perencanaan Teknis.

Rencana Jaringan Penyediaan Air Baku untuk berbagai kebutuhan, diterjemahkan sebagai upaya pembangunan tampungan air baku baru dan revitalisasi tampungan yang sudah ada. Selama 2 (dua) periode perencanaan terakhir, pembangunan tampungan air baku baru dilaksanakan dengan Anggaran Pemerintah Pusat. Sedangkan operasi dan pemeliharaan jaringan tersebut (apabila sudah selesai) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Telah disepakati pada Sidang Umum PBB Sept 2015. SDGs Merupakan kelanjutan Millenium Development Goals (MDGs) yang bertujuan untuk mencapai Kemajuan semua bangsa di Dunia. SDGs mencakup 17 tujuan 169 target 241 indikator. Di Indonesia, komitmen terhadap pencapaian SDGs/Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.



Gambar 3.1 Pilar Pembangunan dalam TPB
(Sumber : Paparan Bappenas 2018)

Dalam TPB, dukungan Lingkup Sumber Daya Air masuk dalam pencapaian Pilar Pembangunan Lingkungan yang secara umum, bertanggung jawab untuk penyediaan air baku (Goal 2 dan Goal 6), keberlanjutan ekosistem dan mitigasi bencana akibat daya rusak air (Goal 13).

Merupakan komitmen Nasional dalam mengantisipasi perubahan iklim melalui tindakan adaptasi. Secara Nasional, telah dideklarasikan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) pada tahun 2005 yang fokus dalam kegiatan antara lain konservasi sumber air/tampungan, pencegahan kerusakan lingkungan, penanaman pohon, dan kampanye hemat air.



*Rencana Aksi Nasional
Adaptasi Perubahan Iklim*



Pengurangan Resiko Bencana

Merupakan indikator kapasitas daerah dalam menghadapi kerentanan (vulnerability) dan ancaman (hazard) bencana meteorologi dan bencana geologi. Terdapat 7 (tujuh) strategi peningkatan kapasitas daerah, yang untuk lingkup Sumber Daya Air dapat dikategorikan dalam **Strategi 5 : Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana**



NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUMLAH INDIKATOR	PERSEN
1	BMKG	1	1.2%
2	BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMANTAN	1	1.2%
3	BNPB	31	43.4%
4	BRG	1	1.7%
5	KEMEN ATR	2	2.1%
6	KEMEN ESDM	3	2.8%
7	KEMEN PU-PERA	12	23.1%
8	KEMEN PU-PERA, KKP	1	1.7%
9	KEMENDAGRI	9	9.5%
10	KEMENDIKASBUD, KEMENAG	1	1.6%
11	KEMENKES	1	1.6%
12	KEMENKOMINFO	1	0.8%
13	KEMENPU-PERA	1	1.4%
14	KEMANTAN	1	0.3%
15	KEMANTAN, KEMEN PU-PERA	1	1.2%
16	KLHK	3	4.7%
17	POLRI	1	1.8%
TOTAL		71	100.0%

Kontribusi penting unsur Pekerjaan Umum Dalam perhitungan Indikator Resiko Bencana Indonesia (IRBI) mencapai 23% dari total indikator

Gambar 3.2 Tujuh Strategi peningkatan Indeks Kapasitas Daerah dalam pengurangan resiko Bencana Geologi dan Hidrologi dan Kontribusi masing – masing unsur dalam pencapaian indikator
(Sumber : Paparan BNPB 2018)

Berdasarkan dokumen Pengurangan Resiko Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan

unsur Pekerjaan Umum untuk memenuhi **Strategi 5 : Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana** adalah :

- a. Pengurangan frekwensi dan dampak bencana banjir melalui pembuatan biopori dan sumur resapan
- b. Pengurangan frekwensi dan dampak bencana banjir melalui perlindungan daerah tangkapan air
- c. Pengurangan frekwensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai
- d. Pengurangan frekwensi dan dampak tanah longsor melalui penguatan lereng
- e. Penguatan aturan daerah tentang pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan untuk pengurangan resiko bencana kekeringan
- f. Penguatan aturan daerah tentang pengembangan sistem pengelolaan dan pengembangan area hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan bencana banjir bandang
- g. Penerapan bangunan tahan gempa bumi dalam penerbitan IMB
- h. Pembangunan zona peredam gelombang tsunami pada daerah beresiko
- i. Pemeliharaan dan peningkatan ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota



Kebijakan Satu Peta

Merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian 1 : 50.000. Kebijakan ini mendukung percepatan pembangunan nasional melalui integrasi peta dan data spasial sehingga akan memiliki satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Dinas PU Sumber Daya Air berkontribusi dalam penyiapan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Daerah Irigasi



Anggaran Responsif Gender

Merupakan Komitmen untuk memberikan manfaat pembangunan yang sama bagi Laki – laki, Perempuan dan anak – anak melalui anggaran yang lebih berkeadilan. Untuk Dinas PU Sumber Daya Air, kegiatan pengelolaan Irigasi dipilih sebagai Kegiatan Responsif Gender. Mengingat manfaat irigasi dirasakan oleh semua

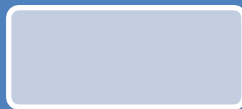
Dari Telaah yang telah dilakukan, Isu – Isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur untuk periode 2019 – 2024 dirumuskan sebagai berikut :



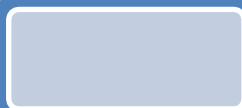
Menambah tampungan air baku di permukaan melalui revitalisasi tampungan yang sudah ada baik di sungai maupun waduk



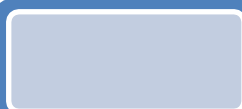
Meningkatkan resapan air di hulu DAS untuk mengurangi resiko bencana dan menambah simpanan air tanah



Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola Sumber Daya Air sebagai upaya memperkuat rencana pembangunan berbasis Daerah Aliran Sungai



Mendukung Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional dalam rangka Ketahanan Pangan



Memantapkan ketahanan air dalam rangka mendukung sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Bab 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Merupakan rumusan target yang akan dicapai selama 5 tahun. Tujuan Jangka Menengah yang ditetapkan adalah Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan Indikator Tujuan peningkatan Indeks Ketahanan Air (*Water Security Index*) selama 5 tahun yang merupakan agregasi ketersediaan versus kebutuhan air untuk berbagai kebutuhan.

Sampai pertengahan tahun 2019 paling sedikit terdapat 3 (tiga) konsep menghitung Indeks Ketahanan Air yaitu

(1) Referensi analisa yang dibuat oleh Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2013 yang disempurnakan lagi tahun 2016.

(2) Selanjutnya terdapat konsep Ketahanan Air Nasional yang metode perhitungannya sedang disusun oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.

(3) Rancangan 0 (R0) Pedoman perhitungan Indeks Ketahanan Air pada Wilayah Sungai yang disusun oleh Puslitbang Air Kementerian PUPR. Untuk sementara, sampai Pedoman Perhitungan Indeks Ketahanan Air (IKA) dikeluarkan secara resmi, Perhitungan Indeks Ketahanan Air akan menggunakan Pedoman R0 karena ketersediaan data relatif dapat dipenuhi.

Dari Tujuan dan Indikator Tujuan yang ditetapkan, untuk selanjutnya dirumuskan 3 sasaran dan indikator sasaran (**Tabel 4.1**) yaitu :

- a. Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki, dengan indikator sasaran % Kondisi fisik prasarana irigasi dalam kondisi baik
- b. Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan indikator sasaran % tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
- c. Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi, dengan indikator sasaran % Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir

**TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	target Kiner Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Indeks Ketahanan Air	2,92	2,92	2,92	2,94	2,96	2,98
2	Meningkatkan optimalisasi pengelolaan irigasi	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki	% Kondisi fisik prasarana irigasi dalam kondisi baik	68,75	68,8	68,85	68,9	68,95	69
3	Penyediaan air baku untuk kebutuhan Masyarakat (Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014)	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	% tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	82,68	82,8	82,9	83	83,1	83,2
4	Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	% Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir	5,69%	5,63%	5,57%	5,51%	5,45%	5,39%
5	Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83,96	84,06	84,16	84,26	84,36	84,46
			Persentase Indikator Program Yang Tercapai	88%	89%	90%	91%	92%	93%
			Persentase Realisasi Anggaran	88%	89%	90%	91%	92%	93%
			Indeks Profesionalitas ASN	78%	78%	80%	81%	82%	83%

4.2 Formulasi dan Kebutuhan Data untuk Perhitungan Indikator

4.2.1 Indeks Ketahanan Air

Merupakan kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitasnya (yang untuk saat ini analisa sektoralnya masih terbatas) pada sektor Rumah Tangga (Domestik), Ekonomi, Perkotaan, Lingkungan dan Bencana. Untuk masing – masing sektor telah ditentukan pula sub indikator dalam menghitung tingkat pemenuhan kebutuhan untuk selanjutnya dikonversi menjadi indeks. Konversi Indeks pada tiap sektor mengacu pada Tabel Kriteria Indeks yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank tahun 2016.

Beberapa catatan kritis dalam perhitungan IKA yang digunakan saat ini, yang diharapkan dapat menyempurnakan perhitungan IKA kedepannya antara lain :

- Belum melakukan pembobotan antar indeks dan antar sub indikator dalam indeks. Sehingga prioritas untuk Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga misalnya, masih sama dengan Indeks Ketahanan Air untuk Lingkungan.
- Belum ada representasi perhitungan indeks dan sub indikator untuk pemenuhan kebutuhan air di kawasan pedesaan
- Belum ada perhitungan indeks dan Sub Indikator untuk kondisi air tanah
- Konversi dari sub indikator – indeks – IKA masih sederhana, dalam rentang angka dan belum memungkinkan perhitungan kenaikan IKA dalam digit desimal.
- Rentang Angka konversi sub indikator – Indeks relatif lebar sehingga untuk meningkatkan angka 1 poin di IKA, perlu upaya masif di lapangan.

Perhitungan IKA juga memiliki hubungan dengan indikator Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*Sustainable Development Goals*) yaitu



Gambar 4.1 Hubungan Indeks Ketahanan Air dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*Sustainable Development Goals*)

Formulasi Indeks Ketahanan Air secara Sederhana dijelaskan sebagai berikut :

INDEKS KETAHANAN AIR =		fungsi rerata	Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga Indeks Ketahanan Air Perkotaan Indeks Ketahanan Air Ekonomi Indeks Ketahanan Air Lingkungan Indeks Ketahanan Bencana Daya Rusak Air
Indeks	Klasifikasi		
1	Sangat Buruk		
2	Buruk		
3	Sedang		
4	Baik		
5	Sangat Baik		
Sumber: Pusair (2017)			

Dimana :

A. Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga

No	Komponen Indeks	Kode TPB	Sub Indikator	Satuan	Ket	
1	Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga	6	1.1	Cakupan Layanan Air Minum	%	
	merupakan kemampuan menyediakan dan mengelola air untuk kebutuhan rumah tangga secara berkelanjutan					
	Tabel 4. Kriteria Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga					
	Jumlah Nilai Indeks		Indeks IKA-RT	Status		
	<5		1	Sangat Buruk		
5 – 8	2	Buruk				
9 – 11	3	Sedang				
12 – 14	4	Baik				
>14	5	Sangat Baik				
Sumber: Asian Development Bank (2016)						
			1.2	Sanitasi Layak	%	
				Tabel 2. Kriteria Indeks Akses Air terhadap Sanitasi Layak		
				Akses Sanitasi (%)	Indeks	Status
				<60	1	Sangat Buruk
				60 – 70	2	Buruk
				70 - 80	3	Sedang
				80 – 90	4	Baik
				>90	5	Sangat Baik
				Sumber: Asian Development Bank (2016)		
			1.3	Higienitas (Prevalensi Diare)	Kejadian	
				Tabel 3. Kriteria Indeks Higienitas		
				Jumlah Kasus Akibat Diare per 100.000 Orang	Indeks	Status
				<190	1	Sangat Buruk
				190 - 500	2	Buruk
				500 – 1.200	3	Sedang
				1.200 - 1.800	4	Baik
				≥ 1.800	5	Sangat Baik
				Sumber: Asian Development Bank (2016)		

B. Indeks Ketahanan Air Perkotaan

No	Komponen Indeks	Kode TPB	Sub Indikator	Satuan	Ket																																				
2	Indeks Ketahanan Air Perkotaan	6; 11	2.1	Suplai Air Perkotaan (sama dengan data 1.1)	%																																				
	2.2		Penanganan Limbah	%																																					
	<i>merupakan ketersediaan dan pengelolaan air di Perkotaan</i>		Air Limbah yang dihasilkan = Populasi Non Kumuh x Akses Sanitasi																																						
	<div>Tabel 4. Kriteria Indeks Ketahanan Air Perkotaan</div> <table><tr><th>Jumlah Nilai Indeks</th><th>Indeks IKA-RT</th><th>Status</th></tr><tr><td><5</td><td>1</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>5 – 8</td><td>2</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>9 – 11</td><td>3</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>12 – 14</td><td>4</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>14</td><td>5</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> <div>Sumber: Asian Development Bank (2016)</div>	Jumlah Nilai Indeks	Indeks IKA-RT	Status	<5	1	Sangat Buruk	5 – 8	2	Buruk	9 – 11	3	Sedang	12 – 14	4	Baik	>14	5	Sangat Baik		<div>Tabel 6. Kriteria Indeks Air Limbah</div> <table><tr><th>Air Limbah (%)</th><th>Indeks Air Limbah</th><th>Status</th></tr><tr><td>0 < 60</td><td>1</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>60 – 70</td><td>2</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>70 – 80</td><td>3</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>80 – 90</td><td>4</td><td>Baik</td></tr><tr><td>90 < 100</td><td>5</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> <div>Sumber: Asian Development Bank (2016)</div>	Air Limbah (%)	Indeks Air Limbah	Status	0 < 60	1	Sangat Buruk	60 – 70	2	Buruk	70 – 80	3	Sedang	80 – 90	4	Baik	90 < 100	5	Sangat Baik		
Jumlah Nilai Indeks	Indeks IKA-RT	Status																																							
<5	1	Sangat Buruk																																							
5 – 8	2	Buruk																																							
9 – 11	3	Sedang																																							
12 – 14	4	Baik																																							
>14	5	Sangat Baik																																							
Air Limbah (%)	Indeks Air Limbah	Status																																							
0 < 60	1	Sangat Buruk																																							
60 – 70	2	Buruk																																							
70 – 80	3	Sedang																																							
80 – 90	4	Baik																																							
90 < 100	5	Sangat Baik																																							

C. Indeks Ketahanan Air Ekonomi

No	Komponen Indeks	Kode TPB	Sub Indikator	Satuan	Ket
3.	Indeks Ketahanan Air Ekonomi <i>merupakan kemampuan menyediakan air secara umum untuk penggunaan ekonomi</i>	2; 6; 7; 8	3.1	Kestabilan suplai air	
			3.1.1	Koefisien Variasi Hujan setahun	
			3.1.2	Koefisien Variasi Hujan antar tahun	
			3.1.3	Rasio Volume Tampungan dengan Volume Air Tersedia	%
			3.2	Rasio pengambilan dan Ketersediaan (Water Stress)	%
			3.3	Indeks Tampungan dan Durasi Kekeringan $= \frac{\sum \text{Kapasitas Waduk}}{\text{Rerata durasi kekeringan tahunan} \times \sum \text{Pengambilan air bulanan}}$	%
			3.4	Ketersediaan Data	
			3.4.1	Data Tampungan air	
			3.4.2	Pengambilan air permukaan dan air tanah	
			3.4.3	Pengambilan air industri	
			3.4.4	Produk Domestik Bruto Sektorair	
			3.4.5	Tapak Air (Water Footprint)	
			3.4.6	Jumlah Pembangkit Listrik	
			3.4.7	Jumlah Pembangkit Listrik menurut Sumbernya	
			3.4.8	Hujan Bulanan	
			3.5	Ketahanan Air Pertanian	
			3.5.1	Produktivitas air pertanian $= \text{PDRB Pertanian} / \text{Jumlah Air untuk Pertanian}$	10 ⁶ USD/km ³
			3.5.2	Swasembada Pangan $= \text{Kebutuhan Beras} / \text{Produksi Beras GKG}$	
				Tabel 10. Kriteria Produktivitas Air Pertanian dan Swasembada Pangan	
				Indeks Produktivitas air pertanian (juta USD/km ²) Swasembada pangan	
				1 0 – 100 > 3	
				2 100 – 200 1,5 – 3	
				3 200 – 350 1 – 1,5	
				4 350 – 1000 0,5 – 1	
				5 > 1000 < 0,5	
			3.6	Produktivitas air untuk energi $= \text{Produksi listrik tenaga air} / \text{Jumlah Air yang digunakan}$	GW/km ³
				Tabel 11. Kriteria Produktivitas Air untuk Energi	
				Indeks Produktivitas air untuk energi (GW/km ²)	
				1 < 10.000	
				2 10.000 – 25.000	
				3 25.000 – 50.000	
				4 50.000 – 100.000	
				5 > 100.000	
			3.7	Produktivitas air untuk industri $= \text{PDRB Industri} / \text{Jumlah Air yang digunakan}$	10 ⁶ USD/km ³
				Tabel 12. Kriteria Produktivitas Air untuk Industri	
				Indeks Produktivitas air untuk industri (Juta USD/km ²)	
				1 < 2.100	
				2 2.100 – 5.500	
				3 5.500 – 20.000	
				4 20.000 – 50.000	
				5 > 50.000	

D. Indeks Ketahanan Air Lingkungan

No	Komponen Indeks	Kode TPB	Sub Indikator	Satuan	Ket
4	Indeks Ketahanan Air Lingkungan <i>merupakan kemampuan mempertahankan kualitas air sungai</i>	6	4.1	Kualitas Air Sungai Tabel 13. Kriteria Status Kualitas Air Sungai	
				Indeks Kriteria	
				1 Cemar Berat > 1 Lokasi	
				2 Cemar Berat 1 Lokasi	
				3 Cemar Sedang	
				4 Cemar Ringan	
				5 Tidak Ada Pencemaran	
				Sumber: Pusair (2017)	
			4.2	Indeks Kekritisian Air $= \text{Pengambilan} / (\text{MARR} - \text{EWR})$ dimana: Pengambilan adalah pengambilan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan air MARR adalah Mean Annual Renewable Resource (jumlah air tersedia) EWR adalah Environmental Water Requirement (kebutuhan air lingkungan)	
				Tabel 14. Kriteria Status Kuantitas Air Sungai	
				Indeks WSI _{EWR}	
				1 0%-20%	
				2 20%-40%	
				3 40%-60%	
				4 60%-80%	
				5 80%-100%	
				Sumber: Smakhtin (2014)	

E. Indeks Ketahanan Air Bencana

No	Komponen Indeks	Kode TPB	Sub Indikator	Satuan	Ket													
5	Indeks Ketahanan Bencana Daya Rusak Air <i>merupakan tingkat resiliensi dalam menghadapi kekeringan dan banjir</i>	6,11	5.1	Curah Hujan Rata - Rata maksimum Mingguan Tabel 15. Kriteria Curah Hujan Rata-Rata Maksimum Per 7 Hari <table><tr><th>Indeks</th><th>Curah hujan rata-rata maksimum per 7 hari (mm)</th></tr><tr><td>1</td><td>> 60</td></tr><tr><td>2</td><td>50 - 60</td></tr><tr><td>3</td><td>40 - 50</td></tr><tr><td>4</td><td>30 - 40</td></tr><tr><td>5</td><td>< 30</td></tr></table>	Indeks	Curah hujan rata-rata maksimum per 7 hari (mm)	1	> 60	2	50 - 60	3	40 - 50	4	30 - 40	5	< 30	mm	
Indeks	Curah hujan rata-rata maksimum per 7 hari (mm)																	
1	> 60																	
2	50 - 60																	
3	40 - 50																	
4	30 - 40																	
5	< 30																	
			5.2	Curah Hujan Harian >100 mm Tabel 16. Kriteria Curah Hujan > 100 mm <table><tr><th>Indeks</th><th>Curah hujan > 100 (mm)</th></tr><tr><td>1</td><td>> 100</td></tr><tr><td>2</td><td>50 - 100</td></tr><tr><td>3</td><td>30 - 50</td></tr><tr><td>4</td><td>15 - 30</td></tr><tr><td>5</td><td>< 15</td></tr></table>	Indeks	Curah hujan > 100 (mm)	1	> 100	2	50 - 100	3	30 - 50	4	15 - 30	5	< 15	mm	
Indeks	Curah hujan > 100 (mm)																	
1	> 100																	
2	50 - 100																	
3	30 - 50																	
4	15 - 30																	
5	< 15																	
			5.3	Jumlah Hari Kering tanpa hujan Tabel 17. Kriteria Jumlah Hari Kering Berturut-Turut <table><tr><th>Indeks</th><th>Jumlah hari kering berturut-turut</th></tr><tr><td>1</td><td>> 60</td></tr><tr><td>2</td><td>30 - 60</td></tr><tr><td>3</td><td>20 - 30</td></tr><tr><td>4</td><td>10 - 20</td></tr><tr><td>5</td><td>< 10</td></tr></table>	Indeks	Jumlah hari kering berturut-turut	1	> 60	2	30 - 60	3	20 - 30	4	10 - 20	5	< 10	hari	
Indeks	Jumlah hari kering berturut-turut																	
1	> 60																	
2	30 - 60																	
3	20 - 30																	
4	10 - 20																	
5	< 10																	
			5.4	Kapasitas Tampungan per Wilayah Sungai Tabel 18. Kriteria Kapasitas Tampungan Per Wilayah <table><tr><th>Indeks</th><th>Kapasitas Tampungan Per Wilayah (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>< 3</td></tr><tr><td>2</td><td>3 - 5</td></tr><tr><td>3</td><td>5 - 20</td></tr><tr><td>4</td><td>20 - 50</td></tr><tr><td>5</td><td>> 50</td></tr></table>	Indeks	Kapasitas Tampungan Per Wilayah (%)	1	< 3	2	3 - 5	3	5 - 20	4	20 - 50	5	> 50	%	
Indeks	Kapasitas Tampungan Per Wilayah (%)																	
1	< 3																	
2	3 - 5																	
3	5 - 20																	
4	20 - 50																	
5	> 50																	
			5.5	Persentase Luas Hutan dalam Wilayah Sungai Tabel 19. Kriteria Luas Hutan dalam Wilayah Sungai <table><tr><th>Indeks</th><th>Luas Hutan dalam Wilayah Sungai (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>< 15</td></tr><tr><td>2</td><td>15 - 20</td></tr><tr><td>3</td><td>20 - 25</td></tr><tr><td>4</td><td>25 - 30</td></tr><tr><td>5</td><td>> 30</td></tr></table>	Indeks	Luas Hutan dalam Wilayah Sungai (%)	1	< 15	2	15 - 20	3	20 - 25	4	25 - 30	5	> 30	%	
Indeks	Luas Hutan dalam Wilayah Sungai (%)																	
1	< 15																	
2	15 - 20																	
3	20 - 25																	
4	25 - 30																	
5	> 30																	

4.2.2 Persentase Kondisi Fisik Prasarana Irigasi dalam Kondisi Baik

Merupakan bertambahnya jumlah bangunan utama dan panjang saluran pembawa/pembuang yang diperbaiki tiap tahunnya dibagi dengan total panjang saluran yang dikelola. Formula sederhana ini dapat digantikan dengan Indeks Prasarana pada Indeks Kinerja Saluran Irigasi (IKSI) apabila penggunaan IKSI sudah dilakukan di semua DI.

4.2.3 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian untuk Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi

Merupakan jaminan ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi. Angka ketersediaan dihitung dari perbandingan data lapangan pemberian air irigasi di intake bendung dengan Rencana Alokasi Air untuk pertanian yang telah disepakati.

Dalam praktiknya, Ketersediaan air tidak pernah mencapai angka 100% karena terdapat proses untuk memberikan kesempatan *top soil* meregenerasi dirinya sendiri melalui bero (tidak menanam) dan musim tanam polowijo

4.2.4 Persentase penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat banjir

Merupakan indikator keberhasilan penanganan banjir yang dilakukan. Mengingat perhitungan luas genangan masih sulit diukur secara akurat, maka digunakan parameter Desa rawan banjir. Untuk angka awal perencanaan digunakan data Laporan Kejadian Banjir tahun 2016 sampai awal tahun 2019 yaitu :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Kejadian Banjir per Kabupaten 2016 – 2019

No.	Kabupaten / Kota	Tahun				Jumlah Kejadian
		2016	2017	2018	2019	
I.	WS. BENGAWAN SOLO					
1	Kabupaten Madiun	1	1	1	6	9
2	Kota Madiun	-	-	-	2	2
3	Kabupaten Pacitan	-	6	10	-	16
4	Kabupaten Ponorogo	1	5	12	1	19
5	Kabupaten Magetan	1	-	-	-	1
6	Kabupaten Ngawi	3	3	-	-	6
7	Kabupaten Bojonegoro	4	28	53	26	111
8	Kabupaten Tuban	20	10	5	6	41
9	Kabupaten Lamongan	56	18	10	-	84
10	Kabupaten Gresik	1	1	6	15	23
II.	WS. BRANTAS					
11	Kabupaten Malang	-	1	-	-	1
12	Kota Malang	-	1	-	1	2
13	Kota Batu	-	-	-	-	-
14	Kabupaten Blitar	1	-	-	1	2
15	Kota Blitar	-	-	-	-	-
16	Kabupaten Tulungagung	1	-	-	-	1
17	Kabupaten Trenggalek	6	4	7	-	17
18	Kabupaten Kediri	-	8	4	-	12
19	Kota Kediri	-	-	-	-	-
20	Kabupaten Nganjuk	-	12	10	-	22
21	Kabupaten Jombang	-	32	12	6	50
22	Kabupaten Mojokerto	3	1	2	1	7
23	Kota Mojokerto	2	-	-	-	2
24	Kabupaten Sidoarjo	-	2	-	1	3
25	Kota Surabaya	-	-	-	-	-
III.	WS. WELANG-REJOSO					
26	Kabupaten Pasuruan	-	18	10	18	46
27	Kota Pasuruan	1	1	1	8	11

28	Kabupaten Probolinggo	-	-	4	-	4	
29	Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	
IV.	WS. PEKALEN-SAMPEAN						
30	Kabupaten Situbondo	3	-	9	5	17	
31	Kabupaten Bondowoso	-	1	9	-	10	
V.	WS. BARU-BAJULMATI						
32	Kabupaten Banyuwangi	-	-	6	10	16	
VI.	WS. BONDOYUDO-BEDADUNG						
33	Kabupaten Lumajang	1	5	8	-	14	
34	Kabupaten Jember	-	7	15	3	25	
VII.	WS. KEPULAUAN MADURA						
35	Kabupaten Bangkalan	1	1	-	1	3	
36	Kabupaten Sampang	8	7	8	6	29	
37	Kabupaten Pamekasan	3	1	4	-	8	
38	Kabupaten Sumenep	-	-	-	-	-	
Jumlah Desa Terdampak Banjir		Jawa Timur	120	210	164	125	484
		WS Pusat	66	132	123	108	330
		WS Provinsi	54	78	41	17	154
Jumlah Kejadian Banjir		Jawa Timur	158	267	261	187	873
		WS Pusat	85	145	153	144	527
		WS Provinsi	73	122	108	43	346

Data lebih rinci disajikan pada **Tabel 4.3**. Pembagian lokasi kejadian berdasarkan kewenangan Wilayah Sungai hanya menunjukkan lokasi kejadian berdasarkan hidrologis saja, mengingat kejadian banjir di Wilayah Sungai Pusat mungkin juga terjadi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terletak di WS Pusat.

Untuk Kejadian Banjir tahun 2019, data yang disajikan berasal dari laporan kejadian banjir musim hujan 2018/2019 periode Januari sampai dengan Maret 2019, mengingat kejadian banjir di periode akhir 2019 masih dalam proses analisis. Dari **Tabel 4.3** dapat diambil kesimpulan bahwa Jumlah Desa dan Kejadian Banjir meningkat sejak tahun 2016 sampai dengan 2018. Formula perhitungan Penurunan Desa terdampak banjir disajikan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Desa/Kelurahan Rawan Banjir di Jawa Timur} \\ = \frac{\text{Jumlah Desa/Kel Rawan Banjir}}{\text{Desa/Kel di Jatim}} = \frac{484}{8501} = 5,69\% \text{ Jumlah}$$

$$\text{Persentase rencana penanganan banjir (per tahun 5 desa)} \\ = \frac{\text{Jumlah Desa/Kel yang ditangani}}{\text{Jumlah Desa/Kel di Jatim}} = \frac{5}{8501} = 0,06\%$$

Tabel 4.3 Kejadian Banjir berdasarkan Laporan Kejadian Tahun 2016 sd 2019

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
1	Provinsi	GUNUNG MADDAH	SAMPANG	SAMPANG		6	10	6	22	Kali Kamoning
2	Provinsi	PANGGUNG	SAMPANG	SAMPANG		6	10	6	22	Kali Kamoning
3	Provinsi	DALPENANG	SAMPANG	SAMPANG		6	9	6	21	Kali Kamoning
4	Provinsi	TANGGUMONG	SAMPANG	SAMPANG		5	10	4	19	Kali Kamoning
5	Provinsi	PASEYAN	SAMPANG	SAMPANG		6	10		16	Kali Kamoning
6	Provinsi	KARANGKETUG	GADINGREJO	KOTA PASURUAN	4	3	7	1	15	Kali Welang, Petung, Sumber Pinang, Rejoso, Kedung Larangan
7	Provinsi	KAMONING	SAMPANG	SAMPANG	2	2	7	3	14	Kali Pandireh, Klompek, Sbr. Payung, Kemuning
8	Provinsi	TAMBAKREJO	KRATON	PASURUAN	4	2	7		13	Kali Welang, Petung, Sumber Pinang, Wrati, Rejoso, Kedung Larangan
9	Provinsi	SIDOGIRI	KRATON	PASURUAN	3	2	2		7	Kali Welang, Petung, Sumber Pinang, Rejoso, Kedung Larangan
10	Pusat	GEBANG MALANG	MOJOANYAR	MOJOKERTO		1	1	5	7	Kali Sadar, Gembolo, Kali Gayaman
11	Pusat	TEMPURSARI	WUNGU	MADIUN	2	1	1	3	7	Kali Piring, Wuluh, Afvour Sareng
12	Pusat	SIMO	KWADUNGAN	NGAWI			5	2	7	Kali Madiun, Kali Ngelang, Kali Purwosari
13	Provinsi	SUKOREJO	POHJENTREK	PASURUAN	4	2			6	Kali Welang, Petung, Sumber Pinang
14	Pusat	MANCILAN	MOJOAGUNG	JOMBANG		1	5		6	Kali Catak Banteng, Kali Kancir, Kali Gunting
15	Pusat	SEDAPURKLAGEN	BENJENG	GRESIK	3		3		6	Kali Lamong
16	Provinsi	BLEGA	BLEGA	BANGKALAN	3		1	2	6	Kali Blega
17	Provinsi	RONG TENGAH	SAMPANG	SAMPANG	2	2		2	6	Kali Mandireh, Klompek, Sbr. Payung, Kemuning
18	Pusat	KADEMANGAN	MOJOAGUNG	JOMBANG	1	1	3		5	Kali Catak Banteng, Kali Pancir, Kali Gunting
19	Pusat	WARUK TENGAH	PANGKUR	NGAWI			2	3	5	Kali Madiun, Kali Ngelang, Bengawan Solo
20	Pusat	SUMBERGEDE	KEPOH BARU	BOJONEGORO	2	1	2		5	Saluran Sekunder Dander, Kali Rejo, Mekuris, Pacal, Ganggang, Semarmendem
21	Pusat	JUMPUT	SUKOSEWU	BOJONEGORO	1	1	3		5	Kali Kerjo, Kali Pacal, Kali Ganggang, Bengawan Solo
22	Pusat	BAURENO	BAURENO	BOJONEGORO	1	1	2		4	Kali Kerjo, Kali Pacal, Kali Ganggang, Bengawan Solo
23	Pusat	KALISARI	BAURENO	BOJONEGORO	1	1		2	4	Bengawan Solo
24	Pusat	TANGGUNGAN	BAURENO	BOJONEGORO	1	1		2	4	Bengawan Solo
25	Pusat	DUYUNGAN	SUKOSEWU	BOJONEGORO	1	1	2		4	Kali Kerjo, Kali Pacal, Kali Ganggang, Bengawan Solo
26	Pusat	SEMEN KIDUL	SUKOSEWU	BOJONEGORO		1	3		4	Kali Kerjo, Kali Pacal, Kali Ganggang, Bengawan Solo
27	Pusat	SIDODADI	SUKOSEWU	BOJONEGORO	1	1	2		4	Kali Kerjo, Kali Pacal, Kali Ganggang, Bengawan Solo
28	Pusat	MOROWUDI	CERME	GRESIK	4				4	Kali Lamong
29	Pusat	BANCANGAN	SAMBIT	PONOROGO		3			3	Kali Sono
30	Pusat	BENDOAGUNG	KAMPAK	TRENGGALEK				3	3	Kali Tawing, Tengah Brantas, Ngasinan, Bagong Brantas
31	Pusat	SUKOREJO	GANDUSARI	TRENGGALEK				3	3	Kali Tawing, Tengah Brantas, Ngasinan, Bagong Brantas
32	Pusat	GANDUSARI	GANDUSARI	TRENGGALEK				3	3	Kali Tawing, Tengah Brantas, Ngasinan, Bagong Brantas
33	Pusat	NGADIRENGGO	POGALAN	TRENGGALEK		1		2	3	Kali Tawing, Tengah Brantas, Ngasinan, Bagong Brantas
34	Pusat	SOTOJAYAN	SUTOJAYAN	BLITAR	1			2	3	Kali Bogel, Brantas
35	Provinsi	ROGOTRUNAN	LUMAJANG	LUMAJANG		1	2		3	Kali Asem
36	Provinsi	SIDOREJO	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG		3			3	Kali Jatiroto, Kali Banter
37	Provinsi	JATIROTO	JATIROTO	LUMAJANG		3			3	Kali Jatiroto, Kali Banter

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
38	Provinsi	PASIR PUTIH	BUNGATAN	SITUBONDO		1		2	3	Kali Curah Udang, Selowogo
39	Provinsi	BUNGATAN	BUNGATAN	SITUBONDO		1		2	3	Kali Curah Udang, Selowogo
40	Provinsi	KALIANYAR	BANGIL	PASURUAN	1		2		3	Kali Wekang, Rejoso, Kedung Larangan, Kali Petung
41	Provinsi	KRATON	KRATON	PASURUAN	1		2		3	Kali Welang, Petung, Rejoso, Kedung Larangan
42	Pusat	MOJOTRISNO	MOJOAGUNG	JOMBANG		1	2		3	Kali Catak Banteng, Kali Pancir, Kali Gunting
43	Pusat	BETEK	MOJOAGUNG	JOMBANG		1	2		3	Kali Catak Banteng, Kali Pancir, Kali Gunting
44	Pusat	JAJAR	KARTOHARJO	MAGETAN				3	3	Kali Ulo, Kali Madiun, Bengawan Solo
45	Pusat	PURWOSARI	KWADUNGAN	NGAWI			1	2	3	Kali Purwosari, Kali Madiun, Kali Ngelang, Bengawan Solo
46	Pusat	MOJOSARI	KEPOH BARU	BOJONEGORO	1	1	1		3	Kali Kerjo, Bengawan solo
47	Pusat	BUMIREJO	KEPOH BARU	BOJONEGORO	1	1	1		3	Kali Rejo
48	Pusat	WORO	KEPOH BARU	BOJONEGORO	1	1	1		3	Kali Kerjo, Bengawan solo
49	Pusat	TROJALU	BAURENO	BOJONEGORO	2	1			3	Saluran Sekunder Dander, Kali Rejo, Mekuris, Pacal, Ganggang, Semarmendem
50	Pusat	LEBAKSARI	BAURENO	BOJONEGORO		1		2	3	Bengawan Solo
51	Pusat	CANGAKAN	KANOR	BOJONEGORO	1			2	3	Bengawan Solo
52	Pusat	SIDOBANDUNG	BALEN	BOJONEGORO		1	2		3	Kali Kerjo, Kali Pacal, Kali Ganggang, Bengawan Solo
53	Pusat	NGADILUHUR	BALEN	BOJONEGORO	1	1	1		3	Kali Pacal
54	Pusat	LEDOK WETAN	BOJONEGORO	BOJONEGORO	1	2			3	Kali Pacal, Rejo, Bengawan Solo, Clebung, Sekar, Afvour Rancang, Saluran Sekunder Penganten
55	Pusat	NGRASEH	DANDER	BOJONEGORO	1	1	1		3	Kali Kunci, Bengawan Solo
56	Pusat	MERGOREJO	PARENGAN	TUBAN			2	1	3	Sungai Kening
57	Pusat	SELOGABUS	PARENGAN	TUBAN			2	1	3	Sungai Kening
58	Pusat	SUCIHARJO	PARENGAN	TUBAN			2	1	3	Sungai Kening
59	Pusat	MOJODADI	KEDUNGPRING	LAMONGAN		1	1	1	3	Kali Prijetan
60	Pusat	JATIDROJOK	KEDUNGPRING	LAMONGAN		1	1	1	3	Kali Prijetan
61	Pusat	KRADENANREJO	KEDUNGPRING	LAMONGAN		1	1	1	3	Kali Prijetan
62	Pusat	GUNUNGREJO	KEDUNGPRING	LAMONGAN		1	1	1	3	Kali Prijetan
63	Pusat	DUNGUS	CERME	GRESIK	3				3	Kali Lamong
64	Pusat	WOTANSARI	BALONGPANGGANG	GRESIK	3				3	Kali Lamong
65	Pusat	PUCUNG	BALONGPANGGANG	GRESIK	3				3	Kali Lamong
66	Provinsi	PANGELEN	SAMPANG	SAMPANG		1	2		3	Kali Kemuning
67	Pusat	BLONGSONG	BAURENO	BOJONEGORO	1	1	1		3	Kali Kerjo, Bengawan Solo
68	Pusat	TLOGOREJO	KEPOH BARU	BOJONEGORO	1	1	1		3	Kali Kerjo, Bengawan Solo
69	Pusat	SUKOHARJO	PACITAN	PACITAN		1	1		2	Kali Pakel Dan Jelok
70	Pusat	KEBONAGUNG	KEBONAGUNG	PACITAN		1	1		2	Kali Jelok
71	Pusat	PURWOASRI	KEBONAGUNG	PACITAN		1	1		2	Kali Pakel Dan Jelok
72	Pusat	ARJOSARI	ARJOSARI	PACITAN		1	1		2	Kali Grindulu, Asem Gandok, Brungkah, Melati
73	Pusat	BALONG	BALONG	PONOROGO				2	2	Bengawan Solo
74	Pusat	SUGIHAN	KAMPAK	TRENGGALEK				2	2	Kali Tawing, Tengah Brantas, Ngasinan ,Bagong Brantas
75	Pusat	SALAMREJO	KARANGAN	TRENGGALEK		2			2	Kali Ngasinan, Tawing
76	Pusat	WONOCOYO	POGALAN	TRENGGALEK				2	2	Kali Tawing, Tengah Brantas, Ngasinan, Bagong Brantas
77	Pusat	KELUTAN	TRENGGALEK	TRENGGALEK		2			2	Kali Ngasinan, Tawing
78	Pusat	TAMANAN	TRENGGALEK	TRENGGALEK		2			2	Kali Ngasinan, Tawing

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
79	Pusat	NOTOREJO	GONDANG	TULUNGAGUNG				2	2	Kali Sengon Brantas
80	Pusat	PETOK	MOJO	KEDIRI		1	1		2	Kali Klepu
81	Provinsi	ROWOKANGKUNG	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG		2			2	Kali Jatiroto, Kali Banter
82	Provinsi	KLAKAH	KLAKAH	LUMAJANG				2	2	Kali Kandungan, Brantas
83	Provinsi	WONOASRI	TEMPUREJO	JEMBER		2			2	Kali Sanenrejo, Curah Nongko
84	Provinsi	SUMBER AGUNG	SUMBER BARU	JEMBER		2			2	Kali Jatiroto, Tanggul Lama
85	Provinsi	PENANGGUNGAN	MAESAN	BONDOWOSO		1	1		2	Kali Sampean
86	Provinsi	TAMAN	GRUJUGAN	BONDOWOSO		2			2	Kali Sampean
87	Provinsi	WIDORO PAYUNG	BESUKI	SITUBONDO		2			2	Kali Bales, Avour, Pandansuri, Kolarkolan
88	Provinsi	MLANDINGAN WETAN	BUNGATAN	SITUBONDO				2	2	Kali Curah Udang, Selowogo
89	Provinsi	BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	SITUBONDO		2			2	Kali Bales, Avour, Pandansuri, Kolarkolan
90	Provinsi	SUMBERWARU	BANYUPUTIH	SITUBONDO		2			2	Kali Bales, Avour, Pandansuri, Kolarkolan
91	Provinsi	ANDUNGBIRU	TIRIS	PROBOLINGGO		2			2	Anak Sungai Pekalen
92	Provinsi	DRINGU	DRINGU	PROBOLINGGO		2			2	Kali Kedunggaleng
93	Provinsi	TAMBAKAN	BANGIL	PASURUAN		1	1		2	Kali Kedung Larangan
94	Provinsi	SLAMBRIT	KRATON	PASURUAN	1		1		2	Kali Sumber Pinang
95	Provinsi	NGEMPIT	KRATON	PASURUAN	1		1		2	Kali Welang
96	Provinsi	SEMARE	KRATON	PASURUAN	2				2	Kali Welang, Petung, Sumber Pinang
97	Provinsi	WINONGAN KIDUL	WINONGAN	PASURUAN	2				2	Kali Rejoso
98	Pusat	JABONTEGAL	PUNGGING	MOJOKERTO				2	2	Kali Sadar, Gembolo, Kali Gayaman
99	Pusat	GAYAMAN	MOJOANYAR	MOJOKERTO				2	2	Kali Sadar, Gembolo, Kali Gayaman
100	Pusat	BANDAR KEDUNG MULYO	BANDAR KEDUNG MULYO	JOMBANG		1	1		2	Afvour Besuk
101	Pusat	PUCANG SIMO	BANDAR KEDUNG MULYO	JOMBANG	1		1		2	Kali Pilang Hilir
102	Pusat	PERAK	PERAK	JOMBANG	2				2	Sal. Sekunder Pilang Hilir
103	Pusat	KAROBELAH	MOJOAGUNG	JOMBANG		1	1		2	Kali Pancir, Gunting
104	Pusat	BALONGSARI	MEGALUH	JOMBANG	1		1		2	Afvour Pagak
105	Pusat	BAWANGAN	PLOSO	JOMBANG		1	1		2	Kali Marmoyo
106	Pusat	BANARAN	PACE	NGANJUK		2			2	Kali Bodor, Kali Kedungsoko
107	Pusat	PLOSOHARJO	PACE	NGANJUK		1	1		2	Kali Bodor
108	Pusat	REJOSO	REJOSO	NGANJUK		1	1		2	Kali Rejoso, Widas
109	Pusat	BANJAREJO	REJOSO	NGANJUK		1	1		2	Kali Taunan, Kali Semantok
110	Pusat	PAYAMAN	NGRAHO	BOJONEGORO	1	1			2	Bengawan Solo
111	Pusat	SUMBERAGUNG	KEPOH BARU	BOJONEGORO	1	1			2	Kali Kerjo
112	Pusat	POHWATES	KEPOH BARU	BOJONEGORO		2			2	Kali Pacal, Rejo, Bengawan Solo, Clebung, Sekar, Afvour Rancang, Saluran Sekunder Penganten
113	Pusat	SUGIHWARAS	KEPOH BARU	BOJONEGORO		1	1		2	Kali Kerjo, Bengawan Solo
114	Pusat	TULUNGAGUNG	BAURENO	BOJONEGORO	1	1			2	Kali Kerjo
115	Pusat	SELOREJO	BAURENO	BOJONEGORO	1	1			2	Kali Semarmendem
116	Pusat	SUMURAGUNG	BAURENO	BOJONEGORO	1	1			2	Kali Kerjo
117	Pusat	BUMIAYU	BAURENO	BOJONEGORO	1	1			2	Kali Kerjo
118	Pusat	PEKUWON	SUMBEREJO	BOJONEGORO		1	1		2	Saluran Sekunder Penganten
119	Pusat	MEJUWET	SUMBEREJO	BOJONEGORO		2			2	Kali Pacal, Rejo, Bengawan Solo, Clebung, Sekar, Afvour Rancang, Saluran Sekunder Penganten
120	Pusat	SOBONTORO	BALEN	BOJONEGORO		1	1		2	Kali Pacal, Bengawan Solo
121	Pusat	PILANG GEDE	BALEN	BOJONEGORO		2			2	Kali Pacal, Rejo, Bengawan Solo, Clebung, Sekar, Afvour Rancang, Saluran Sekunder Penganten

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
122	Pusat	SEKARAN	BALEN	BOJONEGORO		2			2	Kali Pacal, Rejo, Bengawan Solo, Clebung, Sekar, Afvour Rancang, Saluran Sekunder Penganten
123	Pusat	SUKOSEWU	SUKOSEWU	BOJONEGORO		1	1		2	Kali Ganggang, Bengawan Solo
124	Pusat	NGULANAN	DANDER	BOJONEGORO		2			2	Kali Pacal, Rejo, Bengawan Solo, Clebung, Sekar, Afvour Rancang, Saluran Sekunder Penganten
125	Pusat	NGABLAH	DANDER	BOJONEGORO		2			2	Kali Pacal, Rejo, Bengawan Solo, Clebung, Sekar, Afvour Rancang, Saluran Sekunder Penganten
126	Pusat	KUMPULREJO	PARENGAN	TUBAN			2		2	Sungai Kening
127	Pusat	CENGKONG	PARENGAN	TUBAN			2		2	Sungai Kening
128	Pusat	BRANGKAL	PARENGAN	TUBAN			2		2	Sungai Kening
129	Pusat	BULUREJO	RENGEL	TUBAN	1			1	2	Bengawan Solo
130	Pusat	KANOREJO	RENGEL	TUBAN		1		1	2	Bengawan Solo
131	Pusat	RENGEL	RENGEL	TUBAN		1		1	2	Bengawan Solo
132	Pusat	KAPU	MERAKURAK	TUBAN			1	1	2	Afvour Jambong Menengan
133	Pusat	MANDIREJO	MERAKURAK	TUBAN			1	1	2	Afvour Jambong Menengan
134	Pusat	SUKOSONGO	KEMBANGBAHU	LAMONGAN			1	1	2	Kali Sidowayah
135	Pusat	BANARAN	BABAT	LAMONGAN		1		1	2	Bengawan Solo
136	Pusat	REJOTENGAH	DEKET	LAMONGAN			1	1	2	Kali Blawi
137	Pusat	BABATAGUNG	DEKET	LAMONGAN			1	1	2	Kali Blawi
138	Pusat	MOROCALAN	GLAGAH	LAMONGAN			1	1	2	Kali Blawi
139	Pusat	PASI	GLAGAH	LAMONGAN			1	1	2	Kali Blawi
140	Pusat	PUTATKUMPUL	TURI	LAMONGAN			1	1	2	Kali Blawi
141	Pusat	KEPUDIBENER	TURI	LAMONGAN			1	1	2	Kali Blawi
142	Pusat	SOMOSARI	KALITENGAH	LAMONGAN			1	1	2	Kali Blawi
143	Pusat	MUNGLI	KALITENGAH	LAMONGAN			1	1	2	Kali Blawi
144	Pusat	DELIKSUMBER	BENJENG	GRESIK	2				2	Kali Lamong
145	Pusat	SEKARPUTIH	BALONGPANGGANG	GRESIK	2				2	Kali Lamong
146	Pusat	BANJARAGUNG	BALONGPANGGANG	GRESIK	2				2	Kali Lamong
147	Pusat	KARANGSEMANDING	BALONGPANGGANG	GRESIK	2				2	Kali Lamong
148	Provinsi	KETAPANG BARAT	KETAPANG	SAMPANG	2				2	Kali Mandireh, Klompek, Sbr. Payung, Kemuning
149	Provinsi	LEMPER	PADEMAWU	PAMEKASAN			1	1	2	Kali Kloang, Semajid, Jombang
150	Provinsi	PARTEKER	PAMEKASAN	PAMEKASAN		1		1	2	Kali Kloang
151	Provinsi	BAKALAN	BUGULKIDUL	KOTA PASURUAN	2				2	Kali Welang, Petung, Sumber Pinang
152	Pusat	KARANGPOH	TANDES	SURABAYA				2	2	Kali Kandangan, Brantas
153	Pusat	BALONGSARI	TANDES	SURABAYA				2	2	Kali Kandangan, Brantas
154	Pusat	MANUKAN WETAN	TANDES	SURABAYA				2	2	Kali Kandangan, Brantas
155	Pusat	MANUKAN KULON	TANDES	SURABAYA				2	2	Kali Kandangan, Brantas
156	Pusat	TANJUNGSARI	SUKO MANUNGGAL	SURABAYA				2	2	Kali Kandangan, Brantas
157	Pusat	KANDANGAN	BENOWO	SURABAYA				2	2	Kali Kandangan, Brantas
158	Pusat	KAYEN	PACITAN	PACITAN			1		1	Kali Grindulu
159	Pusat	SEDAYU	ARJOSARI	PACITAN		1			1	Kali Grindulu, Asem Gandok, Brungkah, Melati
160	Pusat	GUNUNGSARI	ARJOSARI	PACITAN		1			1	Kali Grindulu, Asem Gandok, Brungkah, Melati
161	Pusat	PAGUTAN	ARJOSARI	PACITAN		1			1	Kali Grindulu, Asem Gandok, Brungkah, Melati
162	Pusat	JATIMALANG	ARJOSARI	PACITAN		1			1	Kali Grindulu, Asem Gandok, Brungkah, Melati
163	Pusat	GAYUHAN	ARJOSARI	PACITAN		1			1	Kali Grindulu, Asem Gandok, Brungkah, Melati
164	Pusat	KARANGREJO	ARJOSARI	PACITAN		1			1	Kali Grindulu, Asem Gandok, Brungkah, Melati
165	Pusat	KARANGGEDE	ARJOSARI	PACITAN			1		1	Kali Grindulu

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
166	Pusat	MAGUWAN	SAMBIT	PONOROGO			1		1	Kali Sono, Kali Madiun
167	Pusat	CAMPUREJO	SAMBIT	PONOROGO		1			1	Kali Sono
168	Pusat	BULU	SAMBIT	PONOROGO		1			1	Kali Sono
169	Pusat	JABUNG	MLARAK	PONOROGO		1			1	Kali Gendol
170	Pusat	MLARAK	MLARAK	PONOROGO		1			1	Kali Gendol
171	Pusat	SIMAN	SIMAN	PONOROGO			1		1	Kali Gondang, Kali Madiun
172	Pusat	PATIHAN KIDUL	SIMAN	PONOROGO			1		1	Kali Gondang, Kali Madiun
173	Pusat	KUTUKULON	JETIS	PONOROGO		1			1	
174	Pusat	JETIS	JETIS	PONOROGO		1			1	Kali Gendol
175	Pusat	TEGALSARI	JETIS	PONOROGO		1			1	Kali Gendol
176	Pusat	SEDARAT	BALONG	PONOROGO		1			1	Kali Slahut
177	Pusat	TATUNG	BALONG	PONOROGO		1			1	Kali Slahut
178	Pusat	MUNENG	BALONG	PONOROGO		1			1	Kali Slahut
179	Pusat	BANGUNREJO	SUKOREJO	PONOROGO			1		1	Kali Madiun
180	Pusat	PAJU	PONOROGO	PONOROGO			1		1	Kali Kenyang, Kali Madiun
181	Pusat	NGLEBENG	PANGGUL	TRENGGALEK			1		1	Kali Munjungan, Timpak Nongko, Panggul, Plantir, Tengah, Gedangan
182	Pusat	PANGGUL	PANGGUL	TRENGGALEK			1		1	Kali Munjungan, Timpak Nongko, Panggul, Plantir, Tengah, Gedangan
183	Pusat	TAWING	MUNJUNGAN	TRENGGALEK			1		1	Kali Munjungan, Timpak Nongko, Panggul, Plantir, Tengah, Gedangan
184	Pusat	BENDOROTO	MUNJUNGAN	TRENGGALEK			1		1	Kali Munjungan, Timpak Nongko, Panggul, Plantir, Tengah, Gedangan
185	Pusat	SUMBERINGIN	KARANGAN	TRENGGALEK		1			1	Kali Ngasinan
186	Pusat	SUMBER	KARANGAN	TRENGGALEK		1			1	Kali Ngasinan
187	Pusat	BENDOREJO	POGALAN	TRENGGALEK		1			1	Kali Ngasinan, Tawing
188	Pusat	NGADI	MOJO	KEDIRI			1		1	Kali Catut, Kali Marmoyo
189	Pusat	TITIK	SEMEN	KEDIRI			1		1	Kali Bruno
190	Pusat	JABANG	KRAS	KEDIRI			1		1	Kali Klepu, Bruno
191	Pusat	KANDANGAN	KANDANGAN	KEDIRI			1		1	Kali Kontopait Gunting
192	Pusat	KEPUH	PAPAR	KEDIRI		1			1	Saluran Sekunder Pelempayaman, Kali Kalasan
193	Pusat	GAMPENGREJO	GAMPENGREJO	KEDIRI		1			1	Saluran Sekunder Pelempayaman, Kali Kalasan
194	Pusat	MARON	BANYAKAN	KEDIRI			1		1	Kali Bendokrosok, Gunting, Mlinjo
195	Pusat	GAMBYOK	GROGOL	KEDIRI		1			1	Kali Mlinjo
196	Pusat	SUMBERDUREN	TAROKAN	KEDIRI			1		1	Kali Pancir, Gunting, Cincin, Juranglimas, Patran, Kolokoso
197	Pusat	JATI	TAROKAN	KEDIRI			1		1	Kali Pancir, Gunting, Cincin, Juranglimas, Patran, Kolokoso
198	Pusat	SITIARJO	SUMBERMANJING	MALANG			1		1	Panguluran
199	Provinsi	BANJARWARU	LUMAJANG	LUMAJANG			1		1	Kali Bondoyudo, Curah Menjangan
200	Provinsi	SUMBERANYAR	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG		1			1	Kali Bondoyudo, Jatiroto, Banter
201	Provinsi	DAWUHAN WETAN	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG		1			1	Kali Bondoyudo, Jatiroto, Banter
202	Provinsi	BANYUPUTIH KIDUL	JATIROTO	LUMAJANG		1			1	Kali Bondoyudo, Jatiroto, Banter
203	Provinsi	SUKOSARI	JATIROTO	LUMAJANG		1			1	Kali Bondoyudo, Jatiroto, Banter
204	Provinsi	KEBONAGUNG	SUKODONO	LUMAJANG			1		1	Kali Bondoyudo, Curah Menjangan
205	Provinsi	KUTORENON	SUKODONO	LUMAJANG			1		1	Kali Bondoyudo, Curah Menjangan
206	Provinsi	BABAKAN	PADANG	LUMAJANG			1		1	Kali Bondoyudo, Curah Menjangan

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
207	Provinsi	PASEBAN	KENCONG	JEMBER			1		1	Kali Tanggul
208	Provinsi	KENCONG	KENCONG	JEMBER		1			1	Kali Tanggung
209	Provinsi	SUMBERJATI	SILO	JEMBER			1		1	Kali Rembangan, Jompo, Gila
210	Provinsi	SRUNI	JENGGAWAH	JEMBER		1			1	Kali Manyang
211	Provinsi	CANGKRING	JENGGAWAH	JEMBER		1			1	Kali Manyang
212	Provinsi	RAMBIPUJI	RAMBIPUJI	JEMBER	1				1	Kali Dinoyo
213	Provinsi	RAMBIGUNDAM	RAMBIPUJI	JEMBER	1				1	Kali Dinoyo
214	Provinsi	SIDOMULYO	SEMBORO	JEMBER			1		1	Kali Tanggul
215	Provinsi	PONDOK JOYO	SEMBORO	JEMBER			1		1	Kali Tanggul
216	Provinsi	PADOMASAN	JOMBANG	JEMBER	1				1	Kali Wagud
217	Provinsi	KARANG BAYAT	SUMBER BARU	JEMBER		1			1	Kali Tanggung
218	Provinsi	JATIROTO	SUMBER BARU	JEMBER		1			1	
219	Provinsi	JAMBESARI	SUMBER BARU	JEMBER		1			1	Kali Banter
220	Provinsi	KLATAKAN	TANGGUL	JEMBER		1			1	Kali Bangsalsari, Tresno
221	Provinsi	MANGGISAN	TANGGUL	JEMBER		1			1	Kali Tanggul
222	Provinsi	SUKOREJO	BANGSALSARI	JEMBER		1			1	Kali Bangsalsari, Tresno
223	Provinsi	TISNOGAMBAR	BANGSALSARI	JEMBER		1			1	Kali Bangsalsari, Tresno
224	Provinsi	BANGSALSARI	BANGSALSARI	JEMBER		1			1	Kali Bangsalsari, Tresno
225	Provinsi	KAMAL	ARJASA	JEMBER			1		1	Kali Rembangan, Jompo, Gila
226	Provinsi	AJUNG	KALISAT	JEMBER		1			1	Kali Ajung
227	Provinsi	KALISAT	KALISAT	JEMBER		1			1	Kali Ajung
228	Provinsi	SUMBER SALAK	LEDOKOMBO	JEMBER			1		1	Kali Rembangan, Jompo, Gila
229	Provinsi	JEMBER LOR	PATRANG	JEMBER			1		1	Kali Rembangan, Jompo, Gila
230	Provinsi	SUMBERAGUNG	PESANGGARAN	BANYUWANGI		1			1	Kali Gonggo
231	Provinsi	PESANGGARAN	PESANGGARAN	BANYUWANGI		1			1	Kali Gonggo
232	Provinsi	SUMBERBERAS	MUNCAR	BANYUWANGI	1				1	Kali Wagud
233	Provinsi	WRINGIN PUTIH	MUNCAR	BANYUWANGI	1				1	Kali Wagud
234	Provinsi	KEDUNGRINGIN	MUNCAR	BANYUWANGI	1				1	Kali Wagud
235	Provinsi	TAMBAKREJO	MUNCAR	BANYUWANGI	1				1	Kali Wagud
236	Provinsi	TAPANREJO	MUNCAR	BANYUWANGI	1				1	Kali Wagud
237	Provinsi	KEDUNGREJO	MUNCAR	BANYUWANGI	1				1	Kali Wagud
238	Provinsi	DASRI	TEGALSARI	BANYUWANGI		1			1	Saluran Sekunder Salak
239	Provinsi	BUBUK	ROGOJAMPI	BANYUWANGI	1				1	Kali Bate
240	Provinsi	LEMAHBANG DEWO	ROGOJAMPI	BANYUWANGI		1			1	Kali Binau
241	Provinsi	ALAS MALANG	SINGOJURUH	BANYUWANGI		1			1	Kali Bate
242	Provinsi	BANGSRING	WONGSOREJO	BANYUWANGI	1				1	Kali Curah User
243	Provinsi	ALASBULU	WONGSOREJO	BANYUWANGI	1				1	Kali Kajar
244	Provinsi	SIDODADI	WONGSOREJO	BANYUWANGI	1				1	Kali Gringsing
245	Provinsi	BIMOREJO	WONGSOREJO	BANYUWANGI		1			1	Kali Bajulmati
246	Provinsi	SUCOLOR	MAESAN	BONDOWOSO		1			1	Kali Arjasa
247	Provinsi	MAESAN	MAESAN	BONDOWOSO		1			1	Kali Sampean
248	Provinsi	GUNUNGSARI	MAESAN	BONDOWOSO		1			1	
249	Provinsi	JURANGSAPI	TAPEN	BONDOWOSO		1			1	Kali Gayam
250	Provinsi	TAMANSARI	BONDOWOSO	BONDOWOSO		1			1	Kali Kijing
251	Provinsi	KARANGANYAR	KLABANG	BONDOWOSO		1			1	Kali Klampokan
252	Provinsi	PANDAK	KLABANG	BONDOWOSO		1			1	Kali Bluncong
253	Provinsi	LEPRAK	KLABANG	BONDOWOSO		1			1	Kali Bluncong

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
254	Provinsi	WONOBAYO	KLABANG	BONDOWOSO		1			1	Kali Bluncong
255	Provinsi	SUMBERCANTING	BOTOLINGGO	BONDOWOSO		1			1	Kali Klampokan
256	Provinsi	BOTOLINGGO	BOTOLINGGO	BONDOWOSO		1			1	Kali Klampokan
257	Provinsi	KALIREJO	SUMBERMALANG	SITUBONDO		1			1	
258	Provinsi	DEMUNG	BESUKI	SITUBONDO	1				1	Kali Deluwang
259	Provinsi	BESUKI	BESUKI	SITUBONDO	1				1	Kali Patemon, Basiyan
260	Provinsi	KETAH	SUBOH	SITUBONDO	1				1	Kali Deluwang
261	Provinsi	SELOWOGO	BUNGATAN	SITUBONDO		1			1	Kali Plaplangan
262	Provinsi	KILENSARI	PANARUKAN	SITUBONDO	1				1	Rob Pantai Panarukan
263	Provinsi	BANTAL	ASEMBAGUS	SITUBONDO		1			1	Kali Banyu Putih
264	Provinsi	WRINGIN ANOM	BESUKI	SITUBONDO	1				1	Kali Patemon
265	Provinsi	SUMBERANYAR	BANYUPUTIH	SITUBONDO		1			1	Kali Kolarkoran
266	Provinsi	MATEKAN	BESUKI	PROBOLINGGO		1			1	Saluran Primer Sbr Bendo Jeruk
267	Provinsi	KEDUNGDALEM	DRINGU	PROBOLINGGO		1			1	Kali Kedunggaleng
268	Provinsi	PURWOSARI	PURWOSARI	PASURUAN	1				1	Kali Bendo
269	Provinsi	MOJOTENGAH	SUKOREJO	PASURUAN			1		1	Kali Kedunglarangan
270	Provinsi	PETUNGASRI	PANDAAN	PASURUAN		1			1	Kali Kedunglarangan
271	Provinsi	GEMPENG	BANGIL	PASURUAN			1		1	Kali Kedunglarangan
272	Provinsi	MANARUWI	BANGIL	PASURUAN			1		1	Kali Kedunglarangan
273	Provinsi	KALIREJO	BANGIL	PASURUAN			1		1	
274	Provinsi	SIYAR	REMBANG	PASURUAN			1		1	
275	Provinsi	GENENG WARU	REMBANG	PASURUAN			1		1	Kali Kedunglarangan
276	Provinsi	KLAMPIS REJO	KRATON	PASURUAN	1				1	Kali Welang
277	Provinsi	PLINGGISAN	KRATON	PASURUAN	1				1	Kali Welang
278	Provinsi	JERUK	KRATON	PASURUAN	1				1	Kali Sumber Pinang
279	Provinsi	KALIREJO	KRATON	PASURUAN		1			1	
280	Provinsi	SUSUKAN REJO	POHJENTREK	PASURUAN	1				1	Kali Welang
281	Provinsi	SUNGI WETAN	POHJENTREK	PASURUAN	1				1	Kali Welang
282	Provinsi	SEKAR PUTIH	GONDANG WETAN	PASURUAN			1		1	Kali Welang ,Kali Petung
283	Provinsi	BAJANGAN	GONDANG WETAN	PASURUAN			1		1	Kali Welang, Kali Petung
284	Provinsi	SADENG REJO	REJOSO	PASURUAN		1			1	
285	Provinsi	TOYANING	REJOSO	PASURUAN		1			1	
286	Provinsi	KAWIS REJO	REJOSO	PASURUAN		1			1	
287	Provinsi	MANIK REJO	REJOSO	PASURUAN			1		1	Kali Welang, Kali Petung
288	Provinsi	KARANG PANDAN	REJOSO	PASURUAN			1		1	
289	Provinsi	SIDEPAN	WINONGAN	PASURUAN			1		1	Kali Wekang, Rejoso, Kedunglarangan
290	Provinsi	PRODO	WINONGAN	PASURUAN	1				1	Kali Curah Malang
291	Provinsi	BANDARAN	WINONGAN	PASURUAN	1				1	Kali Curah Malang
292	Provinsi	WINONGAN LOR	WINONGAN	PASURUAN		1			1	
293	Provinsi	KEDAWUNG KULON	GRATI	PASURUAN	1				1	Kali Rejoso
294	Pusat	SIRING	PORONG	SIDOARJO	1				1	Afvour Ketapang
295	Pusat	SEMAMBUNG	JABON	SIDOARJO			1		1	Kali Kelondoro
296	Pusat	KUPANG	JABON	SIDOARJO			1		1	Kali Kelondoro
297	Pusat	KEBONDALEM	MOJOSARI	MOJOKERTO	1				1	Kali Sadar
298	Pusat	SUMBER JATI	MOJOANYAR	MOJOKERTO		1			1	Kali Sadar
299	Pusat	PANDANWANGI	DIWEK	JOMBANG			1		1	Kali Jombang Kulon
300	Pusat	SELOREJO	MOJOWARNO	JOMBANG			1		1	Kali Gunting

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
301	Pusat	KEDUNGLUMPANG	MOJOAGUNG	JOMBANG			1		1	Pancir / Catak Banteng, Gunting
302	Pusat	JANTI	MOJOAGUNG	JOMBANG			1		1	Kali Gunting
303	Pusat	TANGGALREJO	MOJOAGUNG	JOMBANG			1		1	Pancir / Catak Banteng, Gunting
304	Pusat	TRAWASAN	SUMOBITO	JOMBANG		1			1	Afvour Bongkot, Ring Ngotok Kanal
305	Pusat	SUMOBITO	SUMOBITO	JOMBANG			1		1	
306	Pusat	CURAH MALANG	SUMOBITO	JOMBANG			1		1	Kali Gunting
307	Pusat	BUDUGSIDOREJO	SUMOBITO	JOMBANG			1		1	
308	Pusat	TALUN KIDUL	SUMOBITO	JOMBANG		1			1	Kali Gunting
309	Pusat	BONGKOT	PETERONGAN	JOMBANG		1			1	
310	Pusat	NGRANDU LOR	PETERONGAN	JOMBANG		1			1	Afvour Kedung Bajul, Watudakon
311	Pusat	KEDUNG LOSARI	TEMBELANG	JOMBANG	1				1	Kali Jombang wetan
312	Pusat	KEDUNG BETIK	KESAMBEN	JOMBANG	1				1	Afvour Kedung Macan
313	Pusat	SIDOKATON	KUDU	JOMBANG			1		1	Kali Marmoyo
314	Pusat	BAKALANRAYUNG	KUDU	JOMBANG			1		1	Kali Marmoyo
315	Pusat	PAGER TANJUNG	PLOSO	JOMBANG		1			1	Afvour Menduro
316	Pusat	KEDUNG DOWO	PLOSO	JOMBANG			1		1	Kali Marmoyo
317	Pusat	KEDUNG JATI	KABUH	JOMBANG			1		1	
318	Pusat	PURISEMANDING	PLANDAAN	JOMBANG			1		1	
319	Pusat	KEPEL	NGETOS	NGANJUK			1		1	Kali Mundeng, Kali Bodor
320	Pusat	CEPOKO	BERBEK	NGANJUK		1			1	Kali Taunan, Kali Semantok
321	Pusat	SENDANG BUMEN	BERBEK	NGANJUK			1		1	Kali Marmoyo, Konang, Tunggak, Bendungan, Tlogorejo, Kuncir
322	Pusat	GROJOGAN	BERBEK	NGANJUK			1		1	Kali Marmoyo, Konang, Tunggak, Bendungan, Tlogorejo, Kuncir
323	Pusat	JOHO	PACE	NGANJUK			1		1	Kali Jurang Limas, Cincin, Patran, Semantok, Kelokoso, Widas
324	Pusat	SANAN	PACE	NGANJUK			1		1	Kali Jurang Limas, Cincin, Patran, Kelokoso
325	Pusat	GEMENGGENG	PACE	NGANJUK		1			1	Kali Bodor
326	Pusat	CAMPUR	GONDANG	NGANJUK		1			1	Kali Senggowar, Brantas
327	Pusat	SENGGOWAR	GONDANG	NGANJUK		1			1	Kali Senggowar, Brantas
328	Pusat	BAGOR KULON	BAGOR	NGANJUK			1		1	Kali Widas, Catak Banteng, Gunting, Brantas
329	Pusat	SIDOKARE	REJOSO	NGANJUK			1		1	Kali Widas, Catak Banteng, Gunting, Brantas
330	Pusat	JATIREJO	REJOSO	NGANJUK		1			1	Kali Rejoso, Widas
331	Pusat	KLAGEN	REJOSO	NGANJUK		1			1	Kali Taunan, Kali Semantok
332	Pusat	DAWUHAN	JATIKALEN	NGANJUK			1		1	Sumber Klampok Widas
333	Pusat	MUNUNG	JATIKALEN	NGANJUK			1		1	Sumber Klampok Widas
334	Pusat	BACEM	KEBONSARI	MADIUN	1				1	Afvour Sareng
335	Pusat	DOLOPO	DOLOPO	MADIUN	1				1	Afvour Sareng
336	Pusat	MOJOPURNO	WUNGU	MADIUN	1				1	Kali Piring
337	Pusat	NGADIREJO	WONOASRI	MADIUN	1				1	Kali Wuluh
338	Pusat	DIMONG	MADIUN	MADIUN	1				1	Kali Wuluh
339	Pusat	MIYONO	SEKAR	BOJONEGORO			1		1	Kali Miyono
340	Pusat	SEKAR	SEKAR	BOJONEGORO			1		1	Kali Miyono
341	Pusat	BOBOL	SEKAR	BOJONEGORO		1			1	Kali Sekar
342	Pusat	CANCUNG	BUBULAN	BOJONEGORO		1			1	Kali Clebung
343	Pusat	CLEBUNG	BUBULAN	BOJONEGORO		1			1	Kali Clebung
344	Pusat	SUMBER BENDO	BUBULAN	BOJONEGORO		1			1	Kali Celebung

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
345	Pusat	NGOROGUNUNG	BUBULAN	BOJONEGORO		1			1	Kali Celebung
346	Pusat	KEDUNGSUMBER	TEMAYANG	BOJONEGORO			1		1	Kali Soko
347	Pusat	NGLUMBER	KEPOH BARU	BOJONEGORO			1		1	Kali Kerjo, Bengawan Solo
348	Pusat	GUNUNGSARI	BAURENO	BOJONEGORO		1			1	Bengawan Solo
349	Pusat	KADUNGREJO	BAURENO	BOJONEGORO		1			1	Bengawan Solo
350	Pusat	PUCANGARUM	BAURENO	BOJONEGORO		1			1	Bengawan Solo
351	Pusat	PESEN	KANOR	BOJONEGORO	1				1	Saluran Sekunder Dander, Kali Rejo, Mekuris, Pacal, Ganggang, Semarmendem
352	Pusat	PALEMBON	KANOR	BOJONEGORO	1				1	Saluran Sekunder Dander, Kali Rejo, Mekuris, Pacal, Ganggang, Semarmendem
353	Pusat	SIMBATAN	KANOR	BOJONEGORO	1				1	Saluran Sekunder Dander, Kali rejo, Mekuris, Pacal, Ganggang, Semarmendem
354	Pusat	KARANG DINOYO	SUMBEREJO	BOJONEGORO		1			1	Afvoor Rancang
355	Pusat	MAYANGKAWIS	BALEN	BOJONEGORO		1			1	
356	Pusat	KABUNAN	BALEN	BOJONEGORO			1		1	Kali Pacal
357	Pusat	KEDUNGBONDO	BALEN	BOJONEGORO		1			1	Bengawan Solo
358	Pusat	MULYOAGUNG	BALEN	BOJONEGORO		1			1	
359	Pusat	MULYOREJO	BALEN	BOJONEGORO		1			1	Bengawan Solo
360	Pusat	SARIREJO	BALEN	BOJONEGORO		1			1	Bengawan Solo
361	Pusat	KALICILIK	SUKOSEWU	BOJONEGORO		1			1	
362	Pusat	SEMAWOT	SUKOSEWU	BOJONEGORO		1			1	
363	Pusat	KLEPEK	SUKOSEWU	BOJONEGORO		1			1	
364	Pusat	KEDATON	KAPAS	BOJONEGORO			1		1	Kali Pacal, Bengawan Solo
365	Pusat	SUMBER ARUM	DANDER	BOJONEGORO			1		1	Kali Kunci, Bengawan Solo
366	Pusat	KUNCI	DANDER	BOJONEGORO			1		1	Kali Kunci, Bengawan Solo
367	Pusat	JATIBLIMBING	DANDER	BOJONEGORO			1		1	Kali Kunci, Bengawan Solo
368	Pusat	MOJORANU	DANDER	BOJONEGORO			1		1	Kali Kunci, Bengawan Solo
369	Pusat	MOJO	KALITIDU	BOJONEGORO		1			1	
370	Pusat	SIDODADI	BANGILAN	TUBAN	1				1	Kali Kening
371	Pusat	KEDUNGJAMBANGAN	BANGILAN	TUBAN	1				1	Kali Kening
372	Pusat	LAJO KIDUL	SINGGAHAN	TUBAN		1			1	
373	Pusat	LAJO LOR	SINGGAHAN	TUBAN		1			1	Saluran Sekunder Nglirip Kanan
374	Pusat	SIMO	SOKO	TUBAN				1	1	Bengawan Solo
375	Pusat	MOJOAGUNG	SOKO	TUBAN				1	1	Bengawan Solo
376	Pusat	PANDANWANGI	SOKO	TUBAN				1	1	Bengawan Solo
377	Pusat	GLAGAHSARI	SOKO	TUBAN				1	1	Bengawan Solo
378	Pusat	KENONGOSARI	SOKO	TUBAN				1	1	Bengawan Solo
379	Pusat	RAHAYU	SOKO	TUBAN				1	1	Bengawan Solo
380	Pusat	KARANGTINOTO	RENGEL	TUBAN			1		1	Bengawan Solo
381	Pusat	NGADIREJO	RENGEL	TUBAN				1	1	Bengawan Solo
382	Pusat	SUMBEREJO	RENGEL	TUBAN				1	1	Bengawan Solo
383	Pusat	SAWAHAN	RENGEL	TUBAN				1	1	Bengawan Solo
384	Pusat	MAGERSARI	PLUMPANG	TUBAN		1			1	Kali Geger
385	Pusat	SEMANDING	SEMANDING	TUBAN	1				1	Kali Karang
386	Pusat	PRUNGGAHAN KULON	SEMANDING	TUBAN	1				1	Kali Karang
387	Pusat	KARANG	SEMANDING	TUBAN	1				1	Kali Karang
388	Pusat	TAHULU	MERAKURAK	TUBAN				1	1	Bengawan Solo

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
389	Pusat	SENDANGHAJI	MERAKURAK	TUBAN				1	1	Bengawan Solo
390	Pusat	TUWIRI WETAN	MERAKURAK	TUBAN			1		1	Afvour Jambong Menengan
391	Pusat	CINGKLUNG	BANCAR	TUBAN				1	1	
392	Pusat	KEDUNGREJO	SUKORAME	LAMONGAN				1	1	Kali Prijetan
393	Pusat	GERMAN	SUGIO	LAMONGAN				1	1	Saluran Sekunder German/ Bangunan Syphon BG 8
394	Pusat	BAKALREJO	SUGIO	LAMONGAN				1	1	
395	Pusat	KANDANGREJO	KEDUNGPRING	LAMONGAN				1	1	
396	Pusat	TLANAK	KEDUNGPRING	LAMONGAN				1	1	Kali Serning, Semarmendem
397	Pusat	KACANGAN	MODO	LAMONGAN				1	1	Kali Prijetan
398	Pusat	SAMBUNGREJO	MODO	LAMONGAN				1	1	Kali Prijetan
399	Pusat	KEDUNGREJO	MODO	LAMONGAN		1			1	Kali Prijetan
400	Pusat	PLAOSAN	BABAT	LAMONGAN				1	1	Afvour German, Bengawan solo
401	Pusat	SOGO	BABAT	LAMONGAN				1	1	Afvour German, Bengawan solo
402	Pusat	BABAT	BABAT	LAMONGAN				1	1	Afvour German, Bengawan solo
403	Pusat	BEDAHAN	BABAT	LAMONGAN				1	1	Afvour German, Bengawan solo
404	Pusat	BATURONO	SUKODADI	LAMONGAN				1	1	Kali Konang, Bengawan Solo
405	Pusat	RANCANG KENCONO	LAMONGAN	LAMONGAN				1	1	Kali Plalangan, Mengkuli, Corong
406	Pusat	KEBET	LAMONGAN	LAMONGAN				1	1	Kali Plalangan, Mengkuli, Corong
407	Pusat	PLOSOWAHYU	LAMONGAN	LAMONGAN				1	1	Kali Plalangan, Mengkuli, Corong
408	Pusat	WONOKROMO	TIKUNG	LAMONGAN				1	1	
409	Pusat	BAKALANPULE	TIKUNG	LAMONGAN				1	1	
410	Pusat	JATIREJO	TIKUNG	LAMONGAN			1		1	
411	Pusat	DLANGGU	DEKET	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
412	Pusat	DINOYO	DEKET	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
413	Pusat	TUKKERTO	DEKET	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
414	Pusat	WEDUNI	DEKET	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
415	Pusat	SIDOMULYO	DEKET	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
416	Pusat	LALADAN	DEKET	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
417	Pusat	MENGANTI	GLAGAH	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
418	Pusat	RAYUNGUMUK	GLAGAH	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
419	Pusat	GEMPOLPENDOWO	GLAGAH	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
420	Pusat	SOKO	GLAGAH	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
421	Pusat	SOMOWINANGUN	KARANGBINANGUN	LAMONGAN		1			1	Kali Blawi
422	Pusat	KETAPANGTELU	KARANGBINANGUN	LAMONGAN		1			1	Kali Blawi
423	Pusat	KARANGBINANGUN	KARANGBINANGUN	LAMONGAN		1			1	Bengawan Solo
424	Pusat	SAMBOPINGGIR	KARANGBINANGUN	LAMONGAN			1		1	Kali Blawi
425	Pusat	PUTATBANGAH	KARANGBINANGUN	LAMONGAN			1		1	Kali Blawi
426	Pusat	TAMBAKPLOSO	TURI	LAMONGAN				1	1	K.Plalangan,Mengkuli,Corong
427	Pusat	BALUN	TURI	LAMONGAN				1	1	Kali Plalangan, Kali Corong
428	Pusat	NGUJUNGREJO	TURI	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
429	Pusat	BAMBANG	TURI	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
430	Pusat	KEBEN	TURI	LAMONGAN				1	1	
431	Pusat	KEMLAGGI LOR	TURI	LAMONGAN				1	1	Kali Blawi
432	Pusat	POMAHANJANGGAN	TURI	LAMONGAN				1	1	
433	Pusat	PUCANGTELU	KALITENGGAH	LAMONGAN				1	1	
434	Pusat	JELAKCATUR	KALITENGGAH	LAMONGAN				1	1	kali Blawi

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
435	Pusat	TIWET	KALITENGAH	LAMONGAN				1	1	
436	Pusat	BLAJO	KALITENGAH	LAMONGAN				1	1	
437	Pusat	GAMBUHAN	KALITENGAH	LAMONGAN				1	1	
438	Pusat	BOJOASRI	KALITENGAH	LAMONGAN				1	1	kali Blawi
439	Pusat	LUKREJO	KALITENGAH	LAMONGAN				1	1	kali Blawi
440	Pusat	KULURAN	KALITENGAH	LAMONGAN		1			1	Bengawan Solo
441	Pusat	SEKARAN	SEKARAN	LAMONGAN				1	1	
442	Pusat	MADURAN	MADURAN	LAMONGAN			1		1	Bengawan Solo
443	Pusat	JANGKUNGSOMO	MADURAN	LAMONGAN			1		1	Bengawan Solo
444	Pusat	GADINGWATU	MENGANTI	GRESIK	1				1	Kali Lamong
445	Pusat	KEDUNGRUKEM	BENJENG	GRESIK	1				1	Kali Lamong
446	Pusat	MUNGGUGIANTI	BENJENG	GRESIK	1				1	Kali Lamong
447	Pusat	BULUREJO	BENJENG	GRESIK	1				1	Kali Lamong
448	Pusat	JOMBANGDELIK	BALONGPANGGANG	GRESIK	1				1	Kali Lamong
449	Pusat	NGAMPEL	BALONGPANGGANG	GRESIK	1				1	Kali Lamong
450	Pusat	BALONGPANGGANG	BALONGPANGGANG	GRESIK				1	1	Kali Kedungpring
451	Pusat	BUNGAH	BUNGAH	GRESIK		1			1	Bengawan Solo
452	Pusat	BULANGAN	DUKUN	GRESIK		1			1	
453	Pusat	WONOKERTO	DUKUN	GRESIK		1			1	
454	Pusat	BANGERAN	DUKUN	GRESIK		1			1	
455	Pusat	TIREMENGAL	DUKUN	GRESIK		1			1	
456	Pusat	DUKUNANYAR	DUKUN	GRESIK		1			1	
457	Provinsi	KARANG DALEM	SAMPANG	SAMPANG				1	1	
458	Provinsi	GUNUNG SEKAR	SAMPANG	SAMPANG				1	1	Sungai Kemuning
459	Provinsi	BANYUMAS	SAMPANG	SAMPANG	1				1	Kali Kemuning
460	Provinsi	PANYEPEN	JRENGIK	SAMPANG	1				1	Kali Panyiburan
461	Provinsi	KETAPANG DAYA	KETAPANG	SAMPANG	1				1	Kali Mandireh, Klompek, Sbr. Payung, Kemuning
462	Provinsi	SUMEDANGAN	PADEMAWU	PAMEKASAN				1	1	Kali Kloang, Kali Semajid, Kali Jombang
463	Provinsi	LADEN	PAMEKASAN	PAMEKASAN		1			1	Kali Jombang, Semajid
464	Provinsi	PATEMON	PAMEKASAN	PAMEKASAN		1			1	Kali Jombang, Semajid
465	Provinsi	GLADAK ANYAR	PAMEKASAN	PAMEKASAN		1			1	Kali Kloang
466	Provinsi	MUANGAN	SARONGGI	SUMENEP	1				1	Kali Sarokah
467	Provinsi	CANGKRENG	LENTENG	SUMENEP	1				1	Kali Sarokah
468	Provinsi	SENDIR	LENTENG	SUMENEP	1				1	Kali Sarokah
469	Pusat	PISANG CANDI	SUKUN	KOTA MALANG	1				1	Sungai Kajar
470	Pusat	SAMAAN	KLOJEN	KOTA MALANG			1		1	
471	Provinsi	KRAPYAKREJO	GADINGREJO	KOTA PASURUAN	1				1	Kali Welang
472	Provinsi	POHJENTREK	PURWOREJO	KOTA PASURUAN	1				1	Kali Gembong
473	Provinsi	PURUTREJO	PURWOREJO	KOTA PASURUAN	1				1	Kali Gembong
474	Provinsi	PURWOREJO	PURWOREJO	KOTA PASURUAN	1				1	Kali Gembong
475	Provinsi	KEPEL	BUGULKIDUL	KOTA PASURUAN	1				1	Kali Petung
476	Provinsi	PETAMANAN	PANGGUNGREJO	KOTA PASURUAN	1				1	
477	Pusat	SURODINAWAN	PRAJURIT KULON	KOTA MOJOKERTO				1	1	Kali Brangkal
478	Pusat	GUNUNG GEDANGAN	MAGERSARI	KOTA MOJOKERTO				1	1	Kali Sadar
479	Pusat	PILANGBANGO	KARTOHARJO	KOTA MADIUN	1				1	Kali Piring
480	Pusat	TAWANGREJO	KARTOHARJO	KOTA MADIUN	1				1	Kali Piring
481	Pusat	WIYUNG	WIYUNG	SURABAYA				1	1	

No	Kewenangan	Desa terdampak Banjir			Laporan Kejadian Banjir					Sungai Penyebab Banjir
		Desa	Kecamatan	Kab/Kota	2019	2018	2017	2016	Total	
482	Pusat	SEMEMI	BENOWO	SURABAYA				1	1	
483	Pusat	PURWOREJO	BALONG	PONOROGO		1			1	Kali Slahung
484	Pusat	POLOREJO	BABADAN	PONOROGO	1				1	Kali Madiun
Jumlah Desa terdampak banjir			Total Jawa Timur	120	210	164	125	484		
			Wilayah Sungai Pusat	66	132	123	108	330		
			Wilayah Sungai Provinsi	54	78	41	17	154		
Jumlah Kejadian Banjir			Total Jawa Timur	158	267	261	187	873		
			Wilayah Sungai Pusat	85	145	153	144	527		
			Wilayah Sungai Provinsi	73	122	108	43	346		

4.3 Perhitungan Indikator Program/Kegiatan

4.3.1 Indeks Profesionalitas ASN

Merupakan Indeks yang menilai profesionalitas ASN dari 4 (empat) komponen yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Perilaku. Masing – masing komponen tersebut dikuantifikasi dalam kriteria :

- Kualifikasi, menggunakan jenjang pendidikan dengan skor
- Kompetensi, menggunakan data Pembinaan Teknis dan Diklat yang pernah diikuti baik Diklat Dalam Jabatan maupun Diklat Diluar Jabatan
- Kinerja, menggunakan data nilai SKP tahun sebelumnya
- Disiplin, menggunakan data hukuman disiplin yang pernah diterima

Prosedur penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilakukan per staf ASN untuk kemudian diagregasi menjadi Indeks Dinas. Penilaian dan Pembobotan Indeks Profesionalitas ASN disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.3 Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN

No	Komponen/Bobot (%)	Klasifikasi/Skor
1	Kualifikasi /25%	S-3 6
		S-2 5
		S-1/D-IV 4
		D-III 3
		D-I 2
		SD/SLTP/SLTA 1
2	Kompetensi / 40%	Diklat Struktural/Dalam Jabatan 2
		Diklat Fungsional 1
		Diklat Teknis 1
		Workshop/Bintek/Seminar 1
3	Kinerja / 30%	Nilai SKP Tahun N – 1
4	Hukuman Disiplin/ 5%	Tidak pernah 100
		Ringan 75
		Sedang 50
		Berat 25

4.3.2 Indeks Teknis Sungai

Merupakan Indeks Penilaian Sungai yang diperkenalkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menilai kondisi sungai dan tingkat daya rusak yang ditimbulkan. Perhitungan Indeks Teknis Sungai bermanfaat untuk menyusun prioritas penanganan sungai yang akan dipelihara.

$$IT_s = 20\% I_{WS} + 40\% I_{LB} + 30\% I_{KB} + 10\% I_{DP}$$

Indeks Teknis Sungai (IT_s) dirumuskan dengan mempertimbangkan antara lain:

- WS Kewenangan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota (I_{WS});
- Luas Areal Terdampak (I_{LB});
- Nilai kerugian banjir (I_{KB});
- Data Pendukung (frekuensi banjir, tinggi genangan, lama genangan, dll) (I_{DP});

Tatacara penilaian disajikan sebagai berikut :

a. I_{WS} = Indeks Teknis WS Kewenangan (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota)

No	Wilayah Sungai	Kewenangan WS	Ordo Sungai		
			Ordo 1	Ordo 2	Ordo 3 - 4
1	WS Lintas Negara	Pusat	0,25	0,50	1,00
2	WS Lintas Provinsi	Pusat	0,25	0,50	1,00
3	WS Strategis Nasional	Pusat	0,25	0,50	1,00
4	WS Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi	1,00	0,75	0,50
5	WS Dalam Satu Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	1,00	0,75	0,50

Jika dilakukan pekerjaan pada 1 (satu) kewenangan WS saja, maka bisa langsung dinilai bobotnya, tetapi jika dilakukan pekerjaan pada 2 (dua) atau lebih kewenangan WS yang berbeda maka dilakukan perhitungan menggunakan rumus:

$$I_{WS} = [I_{WS1} + I_{WS2} + I_{WSn}] / n_{WS}$$

Dimana :

I_{WS} = Indeks teknis WS kewenangan total

$I_{WS1} - I_{WSn}$ = Indeks teknis WS kewenangan ke-1 hingga ke-n WS

n_{WS} = jumlah (n) Indeks teknis yang diperhitungkan

b. I_{LB} = Indeks Teknis Luas Areal Terdampak Banjir

$$I_{LB} = 30\% I_{SP} + 20\% I_{TP} + 30\% I_{PT} + 10\% I_{KI} + 10\% I_{FS}$$

Dihitung dengan Kriteria :

No	Daerah Terdampak Banjir	Areal Terdampak					
		Kecil		Sedang		Besar	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	Sektor Pemukiman (I_{SP})	1 – 50 unit	0,50	51 – 200 unit	0,75	> 200 unit	1,00
2	Sektor Transportasi (I_{TP})						
	Jalan, Terbagi atas:						
	- Jalan Nasional	0,01 – 0,2 km	0,50	0,20 – 0,50 km	0,75	> 0,50 km	1,00
	- Jalan Provinsi	0,01 – 1 km	0,30	1 – 5 km	0,60	> 5 km	0,80
	- Jalan Kabupaten/Kota	0,01 – 1 km	0,20	1 – 5 km	0,50	> 5 km	0,75
3	Sektor Pertanian (I_{PT})	25 – 50 Ha	0,75	50 – 100 Ha	0,85	> 100 Ha	1,00
4	Sektor Kawasan Perindustrian (I_{KI})	0,01 – 10 Ha	0,50	10 – 20 Ha	0,75	> 20 Ha	1,00
5	Sektor Fasilitas Umum (sekolah, Pasar, Masjid, Terminal, Stasiun Kereta, Pelabuhan, Bandara, dll) (I_{FS})	Jika Tidak ada, dinilai 0,00 Jika ada, dinilai 1,00					

c. I_{KB} = Indeks Teknis Nilai kerugian banjir

$$I_{LB} = [I_{NP} + I_{NT} + I_{NPT} + I_{NI} + I_{NF}] / n_{kb}$$

Dihitung dengan Kriteria :

No.	Daerah Terdampak Banjir	Nilai Kerugian Banjir					
		Kecil		Sedang		Besar	
		Jumlah (Juta Rp)	Nilai	Jumlah (Juta Rp)	Nilai	Jumlah (Juta Rp)	Nilai
1	Sektor Pemukiman (I_{NP})	200 – 1.000	0,50	1.000 – 5.000	0,75	>5.000	1,00
2	Sektor Transportasi (I_{NT})	100 – 500	0,50	500 – 1.000	0,75	>1.000	1,00
3	Sektor Pertanian (I_{NPT})	200 – 1.000	0,75	1.000 – 5.000	0,85	> 5.000	1,00
4	Sektor Kawasan Perindustrian (I_{NI})	1.000 – 2.500	0,50	2.500 – 5.000	0,75	> 5.000	1,00
5	Sektor Fasilitas Umum (sekolah, Pasar, Masjid, Terminal, Stasiun Kereta, Pelabuhan, Bandara, dll) (I_{NF})	Jika Tidak ada, dinilai 0,00 Jika ada, dinilai 1,00					

d. I_{DP} = Indeks Teknis Data Pendukung

$$I_{DP} = 30\% I_{PR} + 20\% I_{LP} + 40\% I_{DS} + 10\% I_{SU}$$

Dihitung dengan Kriteria :

No	Data Pendukung	Nilai		
		0,00	0,50	1,00
1	Peta Rawan Bencana Banjir (I_{PR})	Belum ada	Proses penyusunan	Sudah ada
2	Laporan Kejadian Banjir (meliputi data Tinggi genangan, Lama genangan, dan Frekuensi banjir, kerusakan, kerugian banjir, dll) (I_{LP})	Belum ada	Sudah ada tapi Belum lengkap	Lengkap
3	Desain Pengendalian Banjir (I_{DS})	Belum ada / proses desain	Sudah ada (desain >5 tahun)	Sudah ada (desain ≤5 tahun)
4	Surat usulan penanganan banjir Gubernur/Bupati/Walikota (I_{SU})	Belum ada	-	Ada

Untuk selanjutnya perhitungan Indeks Teknis Sungai dapat di tabelkan sebagai berikut :

Perhitungan Indeks Teknis Sungai

0

A. Indeks Teknis WS Kewenangan		20%	0,00	0
1	Nama Sungai			
2	Orde	1		
3	Wilayah Sungai			
4	Kewenangan	Provinsi		
5	Lokasi Administratif			

B. Indeks Teknis Luas Areal terdampak Banjir			40%		0
No	Daerah Terdampak Banjir	Luas (ha)	Dampak	Bobot	Nilai
1	Sektor Pemukiman (I_{SP})			0,3	
2	Sektor Transportasi (I_{TP})			0,2	
	Jalan, Terbagi atas:				
	-Jalan Nasional				
	-Jalan Provinsi				
	-Jalan Kabupaten/Kota				
3	Sektor Pertanian (I_{PT})			0,3	
4	Sektor Kawasan Perindustrian (I_{KI})			0,1	
5	Sektor Fasilitas Umum (sekolah, Pasar, Masjid, Terminal, Stasiun Kereta, Pelabuhan, Bandara, dll) (I_{FUS})			0,1	

C. Indeks Teknis Nilai Kerugian Banjir			30%		0
No	Daerah Terdampak Banjir	Luas (ha)	Dampak	Kerugian	Nilai
1	Sektor Pemukiman (I_{SP})			0,3	
2	Sektor Transportasi (I_{TP})			0,2	
	Jalan, Terbagi atas:				
	-Jalan Nasional				
	-Jalan Provinsi				
	-Jalan Kabupaten/Kota				
3	Sektor Pertanian (I_{PT})			0,3	
4	Sektor Kawasan Perindustrian (I_{KI})			0,1	
5	Sektor Fasilitas Umum (sekolah, Pasar, Masjid, Terminal, Stasiun Kereta, Pelabuhan, Bandara, dll) (I_{FUS})			0,1	

D. Indeks Teknis Data Pendukung		10%		0
No	Data Pendukung	Keterangan		
1	Peta Rawan Bencana Banjir (I_{PRB})			
2	Laporan Kejadian Banjir (meliputi data Tinggi genangan, Lama genangan, dan Frekuensi banjir, kerusakan, kerugian banjir, dll) (I_{LKP})			
3	Desain Pengendalian Banjir (I_{DPS})			
4	Surat usulan penanganan banjir Gubernur/Bupati/Walikota (I_{SUD})			

Bab 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan tahapan perencanaan dimana pada tahap ini dilakukan perumusan deduktif mulai dari masalah pokok, langkah – langkah strategis pemecahan masalah sampai ke detail arah kebijakan.

Arah kebijakan (dijelaskan pada **Tabel 5.1**) selanjutnya menjadi rancangan program/kegiatan dalam Rencana Anggaran Dinas PU Sumber Daya Air 2020 – 2024. Dalam rencana ini, Rancangan Program/Kegiatan sudah mengakomodasi rencana – rencana kegiatan seperti :

- a. Kegiatan Pengelolaan Irigasi *Integrated Participatory Development of Irrigation Program* (IPDMIP) yang bersumber dana *Loan*
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sungai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
- c. Pengelompokan ulang Kegiatan ex Depo Peralatan yang fokus pada kegiatan Normalisasi Saluran Pembawa/Pembuang, Sungai dan Tampungan.
- d. Kegiatan yang mendukung Target sektoral seperti Indeks Resiko Bencana, Kesenjangan Gender, dan Daya Dukung Lingkungan

Secara teknis penganggaran, Arah Kebijakan selanjutnya dijabarkan dalam Program/Kegiatan dengan indikator dan tolok ukur pencapaian kegiatan (**Tabel 5.2**).

TABEL 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<p>Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG</p>			
<p>Misi 1: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah</p>			
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah, dengan sasaran :</p>	<p>sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air yang akan dicapai</p>	<p>Strategi 19 Pemenuhan infrastruktur dasar dan Sumber Daya Air yang layak.</p>	
<p>Meningkatkan Daya Dukung, Fungsi Sumber Daya Air, Daya Tampung Air dan Sumber - Sumber Air</p>	<p>Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan</p>	<p>Pengendalian pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air</p>	<p>Pengendalian Penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air</p>
			<p>Pengendalian dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air</p>
		<p>Peningkatan kualitas data dan koordinasi lintas sektor</p>	<p>Pembuatan Mini Lab Kualitas Air untuk assesmen cepat</p>
			<p>Relokasi pos hujan berbasis hasil rasionalisasi hidrologi</p>
			<p>Pemantauan pos hujan dan duga air yang mendukung flood early warning system dan pengumpulan data</p>
			<p>Peningkatan kualitas data dan peningkatan kemampuan analisa alokasi air</p>
			<p>Publikasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan aksesibilitas data SDA</p>
			<p>aksesibilitas data SDA</p>
			<p>Kaji ulang DED sungai dan Irigasi</p>
			<p>Penguatan kordinasi antar lembaga pengelola</p>
		<p>Penambahan kapasitas resapan di hulu Daerah Aliran Sungai</p>	<p>Pembuatan Konstruksi Penahan Air di Hulu (Diatas Orde 3)</p>
			<p>Penanaman Pohon</p>
<p>Meningkatkan optimalisasi pengelolaan irigasi</p>	<p>Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki</p>	<p>Peningkatan Kinerja Jaringan Irigasi</p>	<p>Rehabilitasi Bangunan Utama</p>
			<p>Pengurangan kebocoran di Saluran Primer dan Sekunder</p>
			<p>Perbaikan Pintu air dan Pembuang</p>
			<p>Pengerukan Rutin Saluran Primer dan Sekunder</p>
			<p>Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi</p>

	Terpenuhinya ketersediaan air untuk irigasi di atas kebutuhan yang ditetapkan dalam SPM	Optimalisasi kebutuhan air irigasi	Pengelolaan Irigasi partisipatif melibatkan P3A Pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten Percepatan pengesahan Perda Irigasi Pemenuhan anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) minimal 50% dengan trend penambahan 5% per tahun Perkuatan Institusi OP Irigasi Penyediaan data OP yang sahih (valid) dan akurat Inisiasi Modernisasi Irigasi
Mengurangi Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Revitalisasi kapasitas tampung sungai dan perbaikan tanggul kritis	Revitalisasi waduk, sungai, embung, ranu kewenangan provinsi Penertiban sempadan Sertifikasi aset Pemasangan Patok Batas
	Bertambahnya panjang tanggul kritis yang diamankan		Penentuan 30 Sungai prioritas di WS Kewenangan Provinsi Perbaikan tanggul dan pembuatan parapet Parapet Bio Engineering Penanaman Vetiver
	Meningkatnya kualitas penanganan kejadian banjir	Peningkatan kualitas penanganan kejadian banjir	Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Kordinasi antar Lembaga Perkuatan database sungai dan sistem pelaporan banjir Respon Tanggap Darurat maksimum 18 jam setelah loaporan masuk Pembentukan Satuan Pemantau Banjir Pengadaan Stock Bahan Banjiran Rp 1 M/UPT/Tahun Peremajaan alat berat dan pengadaan alat/bahan tanggap darurat banjir Pengoperasian Ruang Kendali Sungai Publikasi Data Sungai rawan banjir
Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perencanaan Program sesuai tahapan	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Perencanaan Pemantauan dan pengendalian program/Kegiatan
		Pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi laporan keuangan Verifikasi dokumen pertanggung jawaban
		Pembinaan Pegawai	Peningkatan kapasitas pegawai
			Penyusunan program pembinaan pegawai baik teknis maupun administratif

Bab 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan merupakan jembatan antara proses perencanaan dengan penganggaran. Program dan Kegiatan yang berisi uraian kegiatan, selanjutnya dirinci menjadi Sub Kegiatan.

Rincian tabel mengikuti format dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berisikan Tujuan, Sasaran, Kode, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan data capaian awal perencanaan Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian kegiatan maka ditetapkan indikator dan target yang akan dicapai. Berikut ini dijelaskan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 sampai Tahun 2024, dan dicantumkan lokasi dan unit penanggung jawabnya.

Perihal pemuktahiran peraturan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan, Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kodefikasi sub kegiatan sedikit banyak berubah, maka untuk tampilan table Rencana Program dan Kegiatan kami pisah menjadi dua tampilan tampilan pertama dari tahun 2020-2022 tampilan kedua dari tahun 2023-2024, mengenai pencapaian Rencana Program dan Kegiatan dijelaskan secara rinci pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir		(1.03.02) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Indeks Ketahanan Air	Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir	Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup Tampungan air yang diselesaikan	2	2	988.967.325	2	988.967.325	2	1.250.000.000								PSDA	Prov. Jatim		
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai				Menurunkan Jumlah Kejadian banjir tahunan	Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup pengendalian banjir yang diselesaikan	8	8	6.661.000.000	8	6.661.000.000	9	6.750.000.000								PSDA	Prov. Jatim		
					Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi					Jumlah kegiatan dalam rangka mendukung Pola dan Perencanaan SDA yang dilaksanakan	5	5	1.187.607.565	5	1.187.607.565	5	1.310.877.109								PSDA	Prov. Jatim		
					Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)					Peta Kejadian Banjir tahunan yang dibuat	6	6	437.794.223	6	437.794.223	6	437.794.223								SWP	Prov. Jatim		
										Laporan Kejadian Banjir dalam satu periode musim hujan																Prov. Jatim		
					Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing					Panjang Tebing Sungai/badan air yang diperbaiki pada UPT PSDA WS Sampean Setail	-	-		-		-										Prov. Jatim		
										Jumlah Ruas Sungai yang dinormalisasi pada UPT PSDA WS Sampean Setail	-	-		-		-										Prov. Jatim		
										Jumlah Ruas sungai yang ditangani pada UPT PSDA WS Sampean Setail	-	-		-		-										Prov. Jatim		
										Jumlah sungai yang disurvei tanggunya pada UPT PSDA WS Sampean Setail	5	5	42.285.285	5	42.285.285	5	42.285.285									BONDOWOSO	Prov. Jatim	
										Panjang Tebing Sungai/badan air yang diperbaiki pada UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	75	75		75		75										LUMAJANG	Prov. Jatim	
										Jumlah Ruas Sungai yang dinormalisasi pada UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	-	-		-		-											Prov. Jatim	
										Jumlah Ruas sungai yang ditangani pada UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	5	5		5		5											LUMAJANG	Prov. Jatim
										Jumlah sungai yang disurvei tanggunya pada UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	10	10	49.105.500	10	49.105.500	10	49.105.900										LUMAJANG	Prov. Jatim

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
												2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir				
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
										Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti	2	2		2		2										Prov. Jatim
										Jumlah dokumen naskah kerjasama yang diproses dan ditanda tangani	1	1		1		1										Prov. Jatim
										Jumlah pelatihan teknis untuk Petani Pemakai Air yang dilaksanakan	5	5	540.135.280	5	540.135.280	5	540.135.280							BINFAT	Prov. Jatim	
										Jumlah Risalah Sidang Dewan SDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti	1	1	253.200.000	1	253.200.000	1	253.200.000							PSDA	Prov. Jatim	
										Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Brantas)	1	1		1		1									Prov. Jatim	
										Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Bengawan Solo)	1	1		1		1									Prov. Jatim	
										Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Welang Rejoso)	2	2	103.394.340	2	103.394.340	2	103.394.340							PASURUAN	Prov. Jatim	
										Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Pekalen Sampean)	1	1	61.693.804	1	61.693.804	1	61.693.804								BONDOWOSO	Prov. Jatim
										Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Bondoyudo Bedadung)	2	2	92.180.800	2	92.180.800	2	92.180.800								LUMAJANG	Prov. Jatim

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
										Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Brantas	1	1		1		1									Prov. Jatim
										Panjang saluran irigasi/drainase yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Bengawan Solo	1.000	1.000		1.000		1.000									Prov. Jatim
										Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Bengawan Solo	10	10		10		10									Prov. Jatim
										Panjang saluran irigasi/drainase yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Sampean Setail	728	728		728		728									Prov. Jatim
										Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Sampean Setail	3	3		3		3									Prov. Jatim
										Panjang saluran irigasi/drainase yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	2.000	2.000		2.000		2.000									Prov. Jatim
										Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	6	6		6		6									Prov. Jatim
										Panjang saluran irigasi/drainase yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Welang Pekalen	770	770		770		770									Prov. Jatim
										Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Welang Pekalen	4	4		4		4									Prov. Jatim
										Panjang saluran irigasi/drainase yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	3.830	3.830		3.830		3.830									Prov. Jatim
										Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	1	1		1		1									Prov. Jatim
					Rehabilitasi Bendung Irigasi					Jumlah DI yang dikelola kegiatan rehabilitasinya	23	23	730.639.450	23	730.639.450	23	730.639.450							IRIGASI	Prov. Jatim
										Jumlah Bendung yang dipantau kegiatan rehabilitasinya															Prov. Jatim
										Jumlah Saluran Irigasi/drainase yang dilaporkan kegiatan rehabilitasinya															Prov. Jatim
										Panjang saluran yang dipantau kegiatan rehabilitasinya															Prov. Jatim
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					Jumlah pembinaan teknik untuk petugas irigasi	3	3	741.496.000	3	741.496.000	3	741.496.000							IRIGASI	Prov. Jatim

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
										Panjang Saluran irigasi yang dipelihara pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Welang Pekalen															Prov. Jatim
										Jumlah Bendung dan Jaringan ligasi yang dioperasikan pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Welang Pekalen	1	1	2.415.260.000	1	2.415.260.000	1	3.415.260.000								Prov. Jatim
										Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	4	4		4		4									Prov. Jatim
										Panjang Saluran irigasi yang dipelihara pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura															Prov. Jatim
										Jumlah Bendung dan Jaringan ligasi yang dioperasikan pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	5	5	1.740.583.470	5	1.740.583.470	5	1.240.583.470								Prov. Jatim
					Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi					Jumlah DI yang dipantau muka airnya real time													IRIGASI	Prov. Jatim	
										Jumlah Kabupaten yang dikelola Rencana Tata Tanamnya			1.491.038.200		1.491.038.200		1.491.038.200							IRIGASI	Prov. Jatim
										Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Brantas	55	55	1.076.340.300	55	1.076.340.300	55	1.076.340.300								Prov. Jatim
										Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Bengawan Solo	58	58	848.361.700	58	848.361.700	58	848.361.700								Prov. Jatim
										Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Sampean Setail	13	13	63.406.204	13	63.406.204	13	63.406.204								Prov. Jatim
										Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	13	13	1.049.857.300	13	1.049.857.300	13	1.049.857.300								Prov. Jatim
										Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Welang Pekalen	25	25	255.400.639	25	255.400.639	25	255.400.639								Prov. Jatim
										Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharaannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	5	5	1.461.216.648	5	1.461.216.648	5	1.461.216.648								Prov. Jatim
Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		(X.XX.01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	6	6	20.032.700	6	20.032.700	6	20.032.700								Prov. Jatim

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir	103021.01.01	(1.03.02) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Indeks Ketahanan Air	Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2							2	1.250.000.000	2	1.375.000.000			PSDA	Prov. Jatim
		103021.01.03			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai				Menurunkan Jumlah Kejadian banjir tahunan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	9							9	6.750.000.000	9	7.425.000.000			PSDA	Prov. Jatim
		103021.01.04			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi					Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	5							5	1.187.607.565	5	1.306.368.322			PSDA	Prov. Jatim
		103021.01.06			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya (SUB KEGIATAN BARU)					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1							1	2.000.000.000	1	2.200.000.000			SWP, UPT	Prov. Jatim
		103021.01.19			Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) (SUB KEGIATAN BARU)					Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	1							1	437794223	1	481573645,3			SWP, UPT	Prov. Jatim
		103021.01.35			Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,135							0,135	2518199945	0,135	2770019940			UPT	Prov. Jatim
		103021.01.44			Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) (SUB KEGIATAN BARU)					Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	1							1	4000000000	1	4400000000			SWP, UPT	Prov. Jatim
		103021.01.46			Normalisasi/Restorasi Sungai					Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi	8							8	6321593672	8	6953753039			SWP, UPT	Prov. Jatim
		103021.01.47			Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air (SUB KEGIATAN BARU)					Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	1							1	2000000000	1	2200000000			UPT	Prov. Jatim
		103021.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1							1	2917948379	1	3209743217			SWP, UPT	Prov. Jatim
		103021.01.55			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir (SUB KEGIATAN BARU)					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	5							5	1000000000	5	1100000000			UPT	Prov. Jatim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		10302 1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi					Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	2							2	2737075019	2	3010782521			PSDA, UPT	Prov. Jatim
		10302 1.01.61			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi					Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	3400							3400	75000000000	3400	82500000000			BINFAT	Prov. Jatim
		10302 1.01.62			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi					Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	180							180	1280664700	180	1408731170			PSDA	Prov. Jatim
		10302 1.01.63			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi					Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3400							3400	380000000	3400	418000000			PSDA, SWO, BINFAT	Prov. Jatim
		10302 1.01.64			Operasi dan Pemeliharaan Danau					Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara	1							1	500000000	1	550000000			SWP, UPT	Prov. Jatim
		10302 1.01.65			Operasi dan Pemeliharaan Sungai					Panjang Sungai yang Dipelihara	2							2	34169271688	2	37586198857			SWP, UPT	Prov. Jatim
		10302 1.01.66			Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air					Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	1							1	304256585	1	334682243,5			SWP, UPT	Prov. Jatim
		10302			Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														1,90103E+11		1,43623E+11			SWP, UPT	Prov. Jatim
Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir	10302 1.01.01	(1.03.02) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Indeks Ketahanan Air	Kondisi Fisik Prasarana Irigasi dalam Kondisi Baik dan Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi											45348606405		34260978175			IRIGASI, UPT	Prov. Jatim
		10302 1.02.01			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	5							5	2135500000	5	2349050000			IRIGASI, UPT	Prov. Jatim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		10302.1.02.14			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6							6	6000000000	6	6600000000			IRIGASI, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.02.15			Rehabilitasi Bendung Irigasi					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1							1	730639450	1	803703395			IRIGASI, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.02.21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1747							1747	29402867664	1747	32343154430			IRIGASI, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.02.28			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi					Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	176							176	7079599291	176	7787559220			IRIGASI, UPT	Prov. Jatim
																									Prov. Jatim
		10301			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														1,39111E+11		1,05098E+11			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
Memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir	1E+07	(1.03.02) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan		Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi	Indeks Ketahanan Air										1,39111E+11		1,05098E+11			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.XX.XX			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	11							11	20032700	11	22035970			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.XX.XX			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Jumlah dokumen RKA	1							1	22032700	1	24235970			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.XX.XX			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Jumlah dokumen RKA Perubahan	1							1	22032700	1	24235970			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.XX.XX			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Jumlah dokumen DPA	1							1	22032700	1	24235970			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.XX.XX			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Jumlah dokumen DPA Perubahan	1							1	22032700	1	24235970			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.XX.XX			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah dokumen capaian kinerja	5							5	69248700	5	76173570			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.XX.XX			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4							4	88992700	4	97891970			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.XX.XX			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12							12	1,21108E+11	12	1,33219E+11			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.XX.XX			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	12							12	1724034100	12	1896437510			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		10302.1.XX.XX			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Jumlah Lapoan Verifikasi Penatausahaan	12							12	29362700	12	32298970			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		103021.XX.XX			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	12						12	23782700	12	26160970			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Jumlah Dokumen Anggaran SKPD	2						2	23032700	2	25335970			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	1						1	18340100	1	20174110			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					Jumlah Laporan Keuangan	12						12	57532100	12	63285310			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Jumlah Laporan Prognosis	1						1	29599556	1	32559511,6			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Jumlah Sarana dan Prasana yang Terpenuhi	12						12	3954872620	12	4350359882			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12						12	539666100	12	593632710			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					Jumlah Laporan Data Pegawai	12						12	956779300	12	1052457230			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Jumlah Laporan SKP yang Tepat Waktu	12						12	669239450	12	736163395			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan	12						12	405468142	12	446014956,2			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Jumlah Laporan Daftar Arsip Aktif	1						1	82538060	1	90791866			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Pengiriman Dokumen	1						1	2163840	1	2380224			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12						12	1797972753	12	1977770028			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13						13	441909247	13	486100171,7			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	
		103021.XX.XX			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	13						13	3370272600	13	3707299860			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		103021.XX.XX			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Jasa	1						1	33011500	1	36312650			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		103021.XX.XX			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Jasa	140						140	1333237410	140	1466561151			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		103021.XX.XX			Pemeliharaan Mebel						Jumlah Mebel Yang Dipelihara	1						1	5000000	1	5500000			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		103021.XX.XX			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	7						7	513654340	7	565019774			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim
		103021.XX.XX			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung yang Dipelihara	6						6	1724877400	6	1897365140			SEKRETARIAT, UPT	Prov. Jatim

Bab 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024, Lingkup Sumber Daya Air masuk ke dalam :

MISI 1 Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah

Tujuan 1 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah

Sasaran 9 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air

Dengan Indikator Sasaran **Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik** yang ditargetkan dari 68,70 % pada tahun 2018 menjadi 69% pada Akhir tahun 2024. Untuk mencapai kondisi ini, dilakukan upaya antara lain :

- a. Meningkatkan secara bertahap anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Pemeliharaan Irigasi (AKNOP) secara bertahap minimal 50% sampai akhir tahun 2024. Pemenuhan AKNOP merupakan prasyarat utama untuk mempertahankan pelayanan air dan meningkatkan kinerja Jaringan Irigasi
- b. Memenuhi secara bertahap kebutuhan Juru Pengairan, Petugas Operasi Bendung, Penjaga Pintu Air dan Pekarya Saluran dalam rangka memastikan kebutuhan tenaga lapangan sesuai dengan beban kerja dan mampu menjangkau seluruh jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Melakukan review desain terhadap dokumen perencanaan Irigasi pada 120 Daerah Irigasi yang telah dilakukan SID dan telah melewati umur perencanaan, termasuk desain prioritas rehabilitasi bangunan utama

Arah kebijakan selanjutnya menjadi rancangan program/kegiatan, dan secara spesifik berusaha menjawab Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah yang secara umum dijelaskan sebagai berikut :

a. Tuntutan untuk merespon kejadian banjir lebih cepat

Diantisipasi dengan penempatan anggaran untuk melaksanakan penanggulangan sementara kejadian daya rusak air di 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis. Besarnya anggaran yang dialokasikan maksimal Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) per

UPT dengan penempatan anggaran di kegiatan Unit Siaga Banjir Bidang Sungai, Waduk dan Pantai atau dapat ditempatkan di masing – masing UPT. Kegiatan penanggulangan sementara yang dapat dilaksanakan dengan Dana ini antara lain : penanggulan sementara menggunakan alat berat/manual, penggunaan bahan banjir (Karung pasir, sesek bambu, bongkotan) untuk pembuatan tanggul sementara, penggunaan untuk pembayaran upah pekerja.

Selain itu, untuk mempercepat proses pelaporan, digunakan aplikasi berbasis android bernama Sistem Informasi Bencana Banjir (SIBB) yang direncanakan dapat memberi laporan dan asesmen penyebab/kerugian bencana banjir lebih cepat dari pada penggunaan Form A dan Form B Laporan Banjir yang selama ini memerlukan waktu lebih dari 1 hari untuk proses pengumpulan data, pembuatan laporan, otorisasi dan penyampaian laporan ke Ibu Gubernur.

Leading Unit : Bidang Sungai, Waduk dan Pantai

b. Tantangan untuk menambah cakupan pantauan kualitas air

Sebagai upaya mendukung peningkatan Indeks Lingkungan Hidup terutama kualitas air, mulai Tahun 2020 kegiatan pemantauan kualitas air akan di perluas cakupannya melalui pengoperasian kembali laboratorium mini kualitas air. Diharapkan dengan beroperasinya laboratorium mini, kebutuhan data kualitas air untuk keperluan analisa internal dapat dilakukan lebih cepat.

Leading Unit : Bidang Perencanaan Sumber Daya Air

c. Penurunan Kinerja Layanan Irigasi akibat Perubahan SOTK

Selama periode Renstra, Dinas PU Sumber Daya Air akan melakukan peningkatan kualitas SDM lapangan dengan target Juru Pengairan Provinsi akan mengelola Daerah Irigasi Provinsi. Hal ini dilakukan mengingat Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten dan Provinsi membawa konsekuensi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kabupaten yang mengelola Daerah Irigasi berbasis Administratif (Tanpa memandang Kewenangan) di rasionalisasi.

Salah satu contoh, UPTD Sumber Daya Air Bangil di bawah Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya mengelola DI Bekacak

(Kewenangan Provinsi) harus dirasionalisasi bergabung dengan UPTD Purwosari. Sehingga DI Bekacak yang sebelumnya dikelola tenaga Kabupaten mengalami kekosongan pengelola karena Provinsi belum siap tenaga pengelola.

Leading Unit : Bidang Irigasi

TABEL 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku	2,92	2,92	2,92	2,94	2,96	2,98	
2.	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	68,75	68,8	68,85	68,9	68,95	69	
3.	Persentase pelayanan air untuk irigasi	82,68	82,8	82,9	83	83,1	83,2	
4.	Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir	5,69%	5,63%	5,57%	5,51%	5,45%	5,39%	
5.	Peningkatan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83,96	84,06	84,16	84,26	84,36	84,46	

Bab 8

PENUTUP

Demikianlah, kami sampaikan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur serta akan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur mendatang.

Selain itu Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dasar untuk program/kegiatan Tahun 2024 dan diharapkan dapat mendukung peran, tugas dan fungsi Unit kerja seperti Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan terutama adalah Kondisi ketidak pastian akibat kenaikan harga energi dan pangan. Selain itu perlu juga diperhatikan antara lain Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan produk hukum terbaru seperti Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Kegiatan, Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Surat Keputusan tentang Organisasi Pengadaan.

Atas telah tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, kami ucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Surabaya, April 2023

KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. BAJU TRIHAKSORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008